



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2025

Pemerintah Kota Pontianak
Jalan Rahadi Oesman No.3 Pontianak
www.setda.pontianakkota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta Ridho-Nya, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. LPPD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 dibuat guna menindaklanjuti amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Adapun batas waktu untuk menyampaikan laporan tersebut adalah termuat pada Pasal 70 ayat (3) dan (4) yaitu Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir.

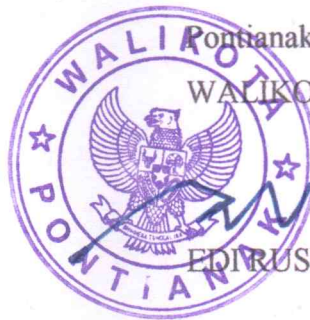
LPPD dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Adapun LPPD Tahun 2025 yang telah disusun Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2026 telah mencakup:

- Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib berkaitan pelayanan dasar.
- Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar.
- Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan pilihan.
- Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi unsur penunjang.
- Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi serta Tugas Umum Pembantuan.
- Data pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kunci pada urusan wajib, urusan pilihan dan unsur penunjang.



Melalui evaluasi terhadap LPPD Tahun 2025, Pemerintah Kota Pontianak terus selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen LPPD ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan dokumen Laporan ini di tahun-tahun yang akan datang.

Demikian LPPD ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Kota Pontianak Tahun 2025 dan kiranya dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang.



Pontianak, 16 Maret 2026

WALIKOTA PONTIANAK

EDIRUSDI KAMTONO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	15
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	55
BAB II.....	59
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	59
2.1 Capaian Kinerja Makro	59
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	59
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	60
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	68
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70
BAB III	93
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	93
3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	93
3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Pontianak.....	94
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	96
3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kota Pontianak	96
Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Wali Kota Pontianak.	96
3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kota Pontianak	96
Tugas Pembantuan dari Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan kepada Kota Pontianak	96
c. Permasalahan dan Kendala	102



d. Saran dan Tindak Lanjut	102
BAB IV	103
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	103
4.1 Urusan Pendidikan	103
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	103
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	104
4.1.4 Dukungan Personil	115
4.1.5 Permasalahan dan Solusi	116
4.2 Urusan Kesehatan	116
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	116
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	117
4.2.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi	128
4.2.3 Dukungan Personil	129
4.2.4 Permasalahan dan Solusi	129
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	130
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	130
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	131
4.3.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi	134
4.3.4 Dukungan Personil	140
4.3.5 Permasalahan dan Solusi	140
4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	141
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	141
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	143
4.4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi	145
4.4.4 Dukungan Personil	147
4.4.5 Permasalahan dan Solusi	147
4.5 Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	148
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	148
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	149
4.5.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi	155



4.5.4	Dukungan Personil.....	164
4.5.5	Permasalahan dan Solusi.....	165
4.6	Urusan Sosial	165
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	165
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	167
4.6.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi	171
4.6.4	Dukungan Personil.....	173
4.6.5	Permasalahan dan Solusi.....	173
BAB V		175
PENUTUP		175



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diserahkan kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban yang diserahkan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang diserahkan kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemerintah Kota Pontianak pada awalnya dikenal dengan *Plaatselijk Fonds* yang berada dibawah Asisten *Residenthe Hoofdder Afdeeling Van Pontianak*. Kemudian berdasarkan besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 Nomor 24/1/1946/PK, *Plaatselijk Fond* ditetapkan menjadi *Stadsgemeente (Landschap Gemeente)*.

Pembentukan *Stadsgemeente* bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang-



Undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah Kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, ketentuan dengan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi **Kota Praja Pontianak**. Pada masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).

Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Praja Pontianak berubah menjadi **Kotamadya Pontianak**, yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak Nomor 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965. Kemudian, dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka sebutan/nama Kotamadya Pontianak berubah menjadi **Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak**.

Seiring dengan bergulirnya reformasi politik akibat jatuhnya rejim orde baru, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, Undang Undang No. 5 Tahun 1974 diganti dengan Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diterbitkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak diganti menjadi Kota Pontianak, dan pemerintahannya disebut **Pemerintah Kota Pontianak**.

Sebutan Pemerintah Kota Pontianak tetap diberlakukan, meskipun Undang Undang No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004, yang direvisi kembali dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang No.3 Tahun 2005 dan Undang Undang No. 12 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.



b. Data Geografis Wilayah

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat secara astronomis terletak antara 0°2'19,868" Lintang Utara samapai 0°5'53,292" Lintang Selatan dan antara 109°16'22,758" Bujur Timur sampai dengan 109°23'9,618" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tempat dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga menjadi Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi dan kelembaan yang tinggi pula. Sesuai Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 Kecamatan 29 Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Daerah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.1.1.-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau diperoleh Luas wilayah administratif Kota Pontianak 118,209 Km².

Letak wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak

No	Uraian	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kabupaten Mempawah
2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pal IX & Desa Punggur Kecil), Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah



3.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Mega Timur dan Desa Ambawang Kuala) dan Desa Sungai Raya (Desa Kapur dan Desa Sungai Raya) Kabupaten Kubu Raya
4.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Sungai Rengas) Kabupaten Kubu Raya dan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kabupaten Mempawah

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2025

Sedangkan jika dilihat dari batas wilayah masing-masing Kecamatan dengan wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Batas Wilayah Kecamatan di Kota Pontianak

No	Uraian	Batas Wilayah
1.	Kecamatan Pontianak Tenggara	berbatasan dengan Sungai Kapuas, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Pontianak Selatan
2.	Kecamatan Pontianak Selatan	berbatasan dengan Sungai Kapuas, Parit Bansir (Kecamatan Pontianak Tenggara), Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Pontianak Kota.
3.	Kecamatan Pontianak Timur	berbatasan dengan Sungai Kapuas Kecamatan Sungai Raya (Desa Kapur) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang)
4.	Kecamatan Pontianak Barat	berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap (Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas)
5.	Kecamatan Pontianak Utara	berbatasan dengan Sungai Kapuas Kecamatan Siantan (Desa Wajok Hulu) Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Kuala Ambawang, Desa Mega



Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2025

Gambar 1.1

PETA ADMINISTRASI KOTA PONTIANAK

1:76,000

0 0.5 1 2 3 4 Kilometers

Coordinate System: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984
Units: Degree

Legenda

- Titik Koordinat Batas Kota Pontianak
- Batas Kota Pontianak
- Jaringan Jalan
- Sungai

Inset Peta

Sumber :

- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.60 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.52 TAHUN 2020 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sources: Bad Nizar, Badnizar Geographics, and the GIS User Community

1) Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Kecamatan

BAB I Pendahuluan



687.031 jiwa pada tahun 2024 menjadi 693.685 jiwa pada tahun 2025. Untuk tingkat penyebaran penduduk pada tahun 2025, wilayah Kecamatan Pontianak Barat adalah yang paling banyak, jumlah penduduknya yaitu sebanyak 153.809 jiwa selanjutnya diikuti secara berturut-turut oleh Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 151.735 jiwa, Kecamatan Pontianak Kota sebanyak 130.798 jiwa, Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 112.440 jiwa, Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 94.314 jiwa, sedangkan Kecamatan Pontianak Tenggara mempunyai jumlah Penduduk sebanyak 50.589 jiwa sehingga menjadikannya sebagai wilayah yang mempunyai jumlah penduduk paling sedikit. Sebaran penduduk Kota Pontianak berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Distribusi Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Penduduk
1	Pontianak Selatan	46.522	47.792	93.741
2	Pontianak Timur	56.469	55.971	112.440
3	Pontianak Barat	76.910	76.899	153.809
4	Pontianak Utara	76.845	74.890	151.735
5	Pontianak Kota	64.636	66.162	130.798
6	Pontianak Tenggara	24.996	25.589	50.589
	KotaPontianak	346.378	347.307	693.685

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Tabel. 1.4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk
1	0-4	45.490
2	5-9	59.534
3	10-14	62.300
4	15-19	58.602
5	20-24	59.001
6	25-29	56.695
7	30-34	52.439



No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk
8	35-39	51.059
9	40-44	52.569
10	45-49	47.967
11	50-54	41.047
12	55-59	34.271
13	60-64	25.850
14	65-69	19.866
15	70-74	12.386
16	> 75	14.609
	Kota Pontianak	693.685

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pontianak pada tahun 2024 sebanyak 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan, terlampir pada tabel dibawah ini :

Tabel .1.5

Kecamatan dan Kelurahan Kota Pontianak

No	Kecamatan dan Kelurahan
1.	Kecamatan Pontianak Utara
	Kelurahan Siantan Hulu Kelurahan Siantan Tengah Kelurahan Siantan Hilir Kelurahan Batulayang
2.	Kecamatan Pontianak Barat
	Kelurahan Pallima Kelurahan Sungaijawi Dalam Kelurahan Sungaijawi Luar Kelurahan Sungaibeliung
3.	Kecamatan Pontianak Timur
	Kelurahan Paritmayor Kelurahan Banjar Serasan Kelurahan Saigon Kelurahan Tanjung Hilir Kelurahan Tanjung Hulu Kelurahan Dalambugis Kelurahan Tambelansampit
4.	Kecamatan Pontianak Kota
	Kelurahan Sungaibangkong Kelurahan Daratsekip Kelurahan Tengah



No	Kecamatan dan Kelurahan
	Kelurahan Mariana Kelurahan Sungai Jawi
5.	Kecamatan Pontianak Tenggara
	Kelurahan Bansir Laut Kelurahan Bansir Darat Kelurahan Bangka Belitung Laut Kelurahan Bangka Belitung Darat
6.	Kecamatan Pontianak Selatan
	Benuamelayu Laut Benuamelayu Darat Kelurahan Parittokaya Kelurahan Kotabaru Kelurahan Akcaya

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2024

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dengan Nomor 7 Tahun 2016, yang didalamnya mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi: 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 3 (tiga) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 1 (satu) Kantor, 6 (enam) Kecamatan serta 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan, dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Pontianak
2. Sekretariat DPRD Kota Pontianak
3. Inspektorat Kota Pontianak
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak
7. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
8. Dinas Penanggulangan Bencana Kota Pontianak



9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
10. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak
11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pontianak
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
14. Dinas Kesehatan Kota Pontianak
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak
16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak
18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
20. Dinas Sosial Kota Pontianak
21. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
22. Dinas Perhubungan Kota Pontianak
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak
24. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
25. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
26. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pontianak
27. Kecamatan Pontianak Barat
 - a. Kelurahan Sungaibeliung
 - b. Kelurahan Sungaijawi Luar
 - c. Kelurahan Sungaijawi Dalam
 - d. Kelurahan Pallima
28. Kecamatan Pontianak Selatan
 - a. Kelurahan Benuamelayu Darat
 - b. Kelurahan Akcaya
 - c. Kelurahan Parittokaya
 - d. Kelurahan Kotabaru
 - e. Kelurahan Benuamelayu Laut



29. Kecamatan Pontianak Timur
 - a. Kelurahan Tanjung Hulu
 - b. Kelurahan Dalambugis
 - c. Kelurahan Saigon
 - d. Kelurahan Tanjung Hilir
 - e. Kelurahan Banjarserasan
 - f. Kelurahan Tambelansampit
 - g. Kelurahan Paritmayor
30. Kecamatan Pontianak Utara
 - a. Kelurahan Siantan Hulu
 - b. Kelurahan Siantan Tengah
 - c. Kelurahan Siantan Hilir
 - d. Kelurahan Batulayang
31. Kecamatan Pontianak Kota
 - a. Kelurahan Sungaibangkong
 - b. Kelurahan Sungaijawi
 - c. Kelurahan Tengah
 - d. Kelurahan Mariana
 - e. Kelurahan Daratsekip
29. Kecamatan Pontianak Tenggara
 - a. Kelurahan Bangka Belitung Laut
 - b. Kelurahan Bangka Belitung Darat
 - c. Kelurahan Bansir Laut
 - d. Kelurahan Bansir Darat

Untuk pelayanan kepada masyarakat perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya adalah perangkat pemerintah yaitu pegawai ASN. Sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sejumlah 6.302 orang.



Tabel, 1.6

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025

INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	60	68	128
Sekretariat DPRD	21	15	36
Inspektorat	24	29	53
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25	29	54
Badan Pendapatan Daerah	31	14	45
Badan Keuangan dan Aset Daerah	23	32	55
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39	9	48
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	18	27	45
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	18	21	39
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	32	33	65
Dinas Kesehatan	137	737	874
Dinas Komunikasi Dan Informatika	30	14	44
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	30	33	63
Dinas Lingkungan Hidup	46	33	79
Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	41	38	79
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	86	43	129
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19	16	35
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	729	2.274	3.003
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	28	33
Dinas Perhubungan	73	23	96
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20	30	50
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	30	23	53
Dinas Sosial	16	19	35
Dinas Tenaga Kerja	10	12	22



INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Badan Kesatuan Bangsa Dan Sosial Politik	6	9	15
UPT Rsud Sultan Syarif Mohamad Alkadrie	144	333	477
UPT RSUD Pontianak Utara	34	103	137
Satuan Polisi Pamong Praja	103	49	152
Kecamatan Pontianak Barat	18	12	30
Kecamatan Pontianak Kota	14	14	28
Kecamatan Pontianak Selatan	16	10	26
Kecamatan Pontianak Tenggara	10	13	23
Kecamatan Pontianak Timur	19	11	30
Kecamatan Pontianak Utara	14	9	23
Kelurahan Pallima	2	5	7
Kelurahan Sungaiбелиung	3	4	7
Kelurahan Sungaijawi Dalam	4	4	8
Kelurahan Sungaijawi Luar	2	3	5
Kelurahan Daratsekip	2	4	6
Kelurahan Mariana	3	3	6
Kelurahan SungaiBangkong	3	5	8
Kelurahan Sungaijawi	2	4	6
Kelurahan Tengah	3	4	7
Kelurahan Akcaya	5	3	8
Kelurahan Benuamelayu Darat	2	4	6
Kelurahan Benuamelayu Laut	1	6	7
Kelurahan Kotabaru	3	3	6
Kelurahan Parittokaya	5	5	10
Kelurahan Bangka Belitung Darat	2	5	7
Kelurahan Bangka Belitung Laut	2	4	6
Kelurahan Bansir Darat	2	6	8
Kelurahan Bansir Laut	4	3	7
Kelurahan Banjarserasan	4	2	6
Kelurahan Dalambugis	3	2	5
Kelurahan Paritmayor	-	6	6
Kelurahan Saigon	6	2	8
Kelurahan Tambelansampit	3	4	7



INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kelurahan Tanjung Hilir	2	4	6
Kelurahan Tanjung Hulu	2	5	7
Kelurahan Batulayang	5	2	7
Kelurahan Siantan Hilir	3	5	8
Kelurahan Siantan Hulu	4	2	6
Kelurahan Siantan Tengah	1	6	7
Jumlah/Total	2.024	4.278	6.302

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
Tahun 2025

f. Realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2024, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan 22 september 2025.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dapat digambarkan pada table berikut ini :

Tabel.1.7

Target dan Realisasi Pendapatan

NO	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE %
1.	Pendapatan Asli Daerah	758.983.313.638,00	782.950.294.554,26	103,16
	Pajak Daerah	532.954.567.281,00	544.783.512.591,00	102,22
	Retribusi Daerah	151.136.899.331,00	147.750.528.378,85	97,76
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	34.809.724.304,00	33.806.655.921,96	97,12
	Lain-lain PAD yang sah	40.082.122.722,00	56.609.597.662,45	141,23
2.	Pendapatan Transper	1.400.186.237.126,00	1.366.636.615.237,00	97,60
	Pendapatan Transper Pemerintah Pusat	1.200.897.782.178,00	1.167.944.482.516,00	97,26
	Pendapatan Transfer	199.288.454.948,00	198.692.132.721,00	99,70



	Anak Daerah			
3.	lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50.000.000,00	147.082.304,58	294,16
	lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	147.082.304,58	294,16
	Pendapatan Daerah	2.159.219.550.764,00	2.149.733.992.095,84	99,56

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025(UNAUDITED)

Dan Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dapat digambarkan pada Tabel. 1.8 berikut:

Tabel 1.8

Target dan Realisasi Belanja Daerah

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI	SELISIH	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	758.983.313.638,00	782.950.294.554,26	103,16	
	Pajak Daerah	532.954.567.281,00	544.783.512.591,00	102,22	
	Retribusi Daerah	151.136.899.331,00	147.750.528.378,85	97,76	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	34.809.724.304,00	33.806.655.921,96	97,12	
	Lain-lain PAD yang sah	40.082.122.722,00	56.609.597.662,45	141,23	
2.	Pendapatan Transper	1.400.186.237.126,00	1.366.636.615.237,00	97,60	
	Pendapatan Transper Pemerintah Pusat	1.200.897.782.178,00	1.167.944.482.516,00	97,26	
	Pendapatan Transfer Anak Daerah	199.288.454.948,00	198.692.132.721,00	99,70	
3.	lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50.000.000,00	147.082.304,58	294,16	
	lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	147.082.304,58	294,16	
	Pendapatan Daerah	2.159.219.550.764,00	2.149.733.992.095,84	99,56	



Sumber : Badan Keuangan daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (UNAUDITED)

Perkembangan pendapatan tahun 2025 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, dimana pada anggaran tahun 2025 target pendapatan sebesar Rp **2.159.219.550.764,00** dengan realisasi sebesar Rp. **2.149.733.992.095,84** atau **99,56** dari target pendapatan Tahun 2025. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di peroleh dari Tahun 2025 pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar Rp**782.950.294.554,26** dari target sebesar Rp. **758.983.313.638,00** atau 103.16% dari target pendapatan asli daerah . Pendapatan Transper merupakan pendapatan yang diterima dari pembagian pemerintah pusat yang kontribusi terhadap pendapatan cukup besar yaitu 97,26 % dari total keseluruhan pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. **1.400.186.237.126,00** dan terealisasi sebesarRp. **1.366.636.615.237,00**.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita dapat tujuan yang akan dicapai dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akurat perlu dibarengi dengan strategi pemerintahan yang berupaya menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed- management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan



yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai :

- a. *Fasilitator* yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat;
- b. *Regulator* yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas;
- c. *Konsultatif* yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan penasehat aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kota Pontianak dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meskipun angka kemiskinan (versi BPS : 4,46% dengan jumlah warga miskin 2022 sebanyak 29.610 jiwa dan 4,45% dengan jumlah warga miskin 2023 sebanyak 29.920 jiwa) terus menunjukkan kinerja positif, namun masih tetap menjadi tugas bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan upaya penguatan jaring pengaman sosial, penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan



warga miskin, serta peningkatan perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

- 2) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi dengan akar permasalahan di beberapa bidang. Dibidang Pendidikan yaitu: belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan karakter, kualitas mutu pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal. Dibidang Kesehatan yaitu : masih belum optimalnya pelayanan kesehatan dibeberapa tingkatan, masih adanya SPM bidang kesehatan yang belum mencapai sasaran (pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan pada lansia). Dibidang tenaga kerja yaitu masih tingginya angka pengangguran serta masih perlu ditingkatkannya kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) VISI

Visi Daerah merupakan intisari dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak dan jabarkan dalam turunan. Isi pembangunan jangka Panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2025-2045 adalah “KOTA PONTIANAK UNGGUL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”. Visi tersebut dapat dijelaskan dalam lima misi yang memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2025-2045 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel Berbasis Informasi.
3. Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Melalui Penyediaan Insfratraktur Hijau.



4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif.
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram dan Tertib Untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.

Visi dan misi jangka panjang tersebut dapat diwujudkan melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Dengan memperhatikan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2025-2029 adalah:

MAJU, SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG HUMANIS”

1. Pontianak Maju

Kota Pontianak akan terus maju dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan infrastruktur. Fokus utamanya adalah menciptakan layanan publik yang berkualitas dan merata bagi semua warga. Dengan memberikan prioritas pada pendidikan dan kesehatan setara dengan negara maju, Pontianak akan bergerak maju secara berkesinambungan dalam peningkatan kualitas hidup warganya.

2. Pontianak sejahtera

Kesejahteraan di Pontianak mencakup kemakmuran, keseimbangan ekonomi, dan kenyamanan hidup yang dapat dinikmati oleh seluruh warga. Mewujudkan kesejahteraan berarti meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran, penguatan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta



menurunkan kesenjangan sosial. Pemerataan akses terhadap layanan dasar, pekerjaan, dan peluang ekonomi menjadi fokus utama untuk memastikan kesejahteraan yang adil bagi semua.

3. Pontianak Berwawasan Lingkungan Yang Humanis

Pontianak akan mengedepankan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana serta pelestarian lingkungan akan dipadukan dengan upaya untuk menciptakan kota yang nyaman dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, Pontianak juga akan menekankan pentingnya hubungan yang humanis antar warga, mendorong solidaritas sosial dan keharmonisan dalam komunitas. Kota ini akan ramah lingkungan dan menjunjung tinggi hak-hak serta kesejahteraan warganya, menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.

2) MISI

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.

Misi ini sejalan dengan visi maju dengan berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan yang mudah diakses, serta pelatihan keterampilan kerja akan menciptakan masyarakat yang siap bersaing dan unggul. Perlindungan sosial bagi pekerja akan memastikan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi bagi seluruh warga.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.

Misi ini mendukung visi maju dan sejahtera dengan mendorong



pemerintahan yang transparan, efektif dan kolaboratif. Melalui penggunaan teknologi informasi, pelayanan public akan lebih cepat dan efisien. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memperkuat hubungan humanis antar warga dan pemerintahan yang mendukung inklusivitas serta inovasi.

3. Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan Kota yang ramah lingkungan dan nyaman untuk ditinggali. Kota Pontianak akan semakin hijau dengan menambah taman dan ruang terbuka yang bisa dinikmati oleh warga sebagai tempat rekreasi dan bersantai. Sistem drainase akan dibangun, dipelihara, dan direhabilitasi untuk mengurangi risiko genangan ketika hujan turun. Pengelolaan sampah juga akan ditingkatkan sehingga lingkungan tetap bersih dan limbah tidak mencemari udara maupun air. Insfratraktur dasar yang mendukung meliputi jalan-jalan yang baik dan memadai untuk memastikan mobilitas warga dan distribusi barang lebih efisien. Penyediaan fasilitas air bersih juga akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga.

Selain itu, akses internet yang cepat dan stabil akan dibangun sebagai bagian dari insfratraktur digital yang penting untuk memfasilitasi aktivitas warga sehari-hari, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun komunikasi. Teknologi pintar akan diterapkan dalam berbagai aspek tata kelola kota, seperti pengelolaan lalu lintas, layanan publik, dan keamanan, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparansi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan insfratraktur dasar dan digital yang kuat, Kota Pontianak akan menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman, modern dan efisien sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan.



4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif.

Misi ini mendukung visi sejahtera dengan menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peneberdayaan usaha kecil dan menengah, pengembangan sektor pariwisata dan kuliner halal, serta pelatihan dalam bidang e-commerce akan membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat di era digital.

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.

Misi ini mendukung visi humanis dengan menekankan pentingnya keharmonisan antar warga. Edukasi hukum, pemberdayaan keluarga sebagai pendidik utama, serta pembangunan fasilitas umum seperti taman bermain, ruang publik dan fasilitas olahraga secara merata di seluruh wilayah Pontianak akan memperkuat ketahanan sosial dan budaya. Hal ini akan mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan ramah bagi semua.

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.



Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 6 (enam) urusan yaitu:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f) Sosial.
2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yaitu:
 - a) Tenaga Kerja;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan Hidup;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan Informatika;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l) Penanaman Modal;
 - m) Kepemudaan dan Olahraga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan; dan
 - r) Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan yaitu:



- a) Kelautan dan Perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Perdagangan; dan
- e) Perindustrian.

Terdapat 3 (tiga) urusan pilihan yang ada dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 namun tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, urusan Kehutanan, dan urusan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak tidak memiliki pemanfaatan langsung terhadap sumber daya alam baik minyak dan gas bumi yang dapat dikelola lebih lanjut, tidak memiliki luasan taman hutan raya yang harus dikelola lebih lanjut, serta Kota Pontianak tidak mengelola secara langsung urusan ketransmigrasian.

Disisi lain, pemerintah daerah dapat melaksanakan program penunjang untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Penelitian dan Pengembangan; dan
5. Fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Program penunjang fungsi lain penunjang urusan pemerintahan dapat terdiri dari :

1. Pelayanan administratif;
2. Unsur Staf;
3. Pengawasan;
4. Penunjang Urusan Pemerintahan Umum

Berikut ini program-program yang disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada saat pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah pada



pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Program-program tersebut mendukung misi kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah terpilih selanjutnya akan menjadi visi misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2025-2029. Adapun program tersebut adalah:

Tabel 1.9
Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

No	Misi	Program Prioritas
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.	a. Program Hidup Sehat dan Bersih, Tujuannya untuk mengajak semua warga Kota Pontianak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat. b. Program Integrasi Layanan Primer, program ini menyatukan layanan kesehatan. c. Program Antenatal berkualitas, program ini membantu ibu hamil agar mendapatkan perawatan kesehatan rutin dan baik. d. Program Penangan Stunting, program ini memberikan makanan bergizi kepada anak-anak dan mengedukasi orang tua agar memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya. e. Program Penanggulangan TBC, bertujuan untuk mengurangi penyebaran TBC dengan memberikan penyuluhanm memperbaiki fasilitas kesehatan untuk diagnosa, dan menyediakan pengobatan yang diperlukan. f. Program Jaminan Sosial Kesehatan, program ini menyediakan jaminan kesehatan bagi semua warga tanpa biaya mahal. g. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, para pekerja akan mendapatkan perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja. h. Program Wajib Belajar 13 Tahun, Program ini mendorong semua anak di Pontianak untuk menyelesaikan pendidikan minimal hingga SMA. i. Program Pendidikan Karakter dan Akhlak, tujuannya menanamkan nilai-nilai moral yang baik pada siswa disekolah. j. Program Insentif PAUD, Tujuan memberikan bantuan kepada guru PAUD agar mereka bisa memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.



No	Misi	Program Prioritas
		k. Program Penanggulangan Kemiskinan, tujuannya membantu mengurangi kemiskinan di pontianak dengan memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja dan pembiayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera. l. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat, melalui program ini, masyarakat akan diberikan pelatihan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. m. Program Olahraga Daerah, program ini mengajak masyarakat untuk lebih aktif berolahraga. n. Program Kota Layak Anak, tujuannya menjadikan pontianak kota yang ramah anak dengan menyediakan fasilitas seperti taman bermain, perpustakaan anak, dan area publik yang aman bagi anak-anak. o. Program Beasiswa Untuk Anak Kurang Mampu, anak- anak dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan beasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir soal biaya sekolah. p. Program Pendidikan Berkualitas Global, program ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di pontianak agar setara dengan pendidikan dinegara maju. q. Program Pusat Layanan Kesehatan Terpadu, pemerintah akan membangun pusat layanan kesehatan yang menyediakan berbagai jenis perawatan dalam satu tempat. r. Program Beasiswa Luar Negeri, siswa berprestasi dan guru akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan diluar negeri, sehingga mereka bisa belajar lebih banyak dan kembali membangun pontianak dengan ilmu yang diperoleh. s. Program Kesehatan Masyarakat Berstandar Internasional, program ini menerapkan standar kesehatan internasional untuk mencegah penyakit menular dan memastikan semua warga pontianak sehat dan terhindar dari berbagai wabah penyakit.



No	Misi	Program Prioritas
		t. Program Makan Gratis, anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu akan mendapatkan makanan bergizi secara gratis setiap hari agar kesehatan mereka terjaga. u. Program Pengembangan Fasilitas Kesehatan, Pemerintah akan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit agar lebih nyaman dan berkualitas dalam memberikan layanan.
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	a. Program Digitalisasi Pemerintahan, pemerintahan akan memanfaatkan teknologi digital agar layanan publik lebih cepat dan efisien. b. Program Pelayanan Prima, pemerintah akan melatih petugas pelayanan publik agar lebih ramah, cepat dan tepat dalam melayani masyarakat. c. Program Pengembangan Kapasitas ASN (Aparatur Sipil Negara), ASN akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka, baik dalam bidang teknis maupun manajerial, sehingga mereka bisa bekerja lebih profesional. d. Program Inovasi Pelayanan Publik, Program ini mendorong pemerintah untuk terus mencari cara baru dan kreatif dalam memberikan pelayanan. e. Program Pendidikan Anti-Korupsi, program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan ASN tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi. f. Program ASN Ber-AKHLAK, ASN akan dididik untuk menerapkan nilai-nilai moral yang baik seperti disiplin, kejujuran dan tanggungjawab dalam bekerja. g. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3.	Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Dan Humanis Melalui Penyediaan sarana, Prasarana	a. Program Ruang Terbuka Hijau, pemerintah akan memperbanyak taman dan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan warga untuk berolahraga, rekreasi atau bersantai. b. Program Pengelolaan Air Limbah Terpadu, program ini bertujuan untuk mengolah air limbah domestik (air kotor dari rumah tangga) agar tidak mencemari lingkungan.



No	Misi	Program Prioritas
	Dasar,Dan Utilitas.	c. Program Tanpa Kantong Plastik, Pemerintah akan mengurangi penggunaan kantong palstik dengan mendorong masyarakat menggunakan tas atau wadah yang bisa dipakai berulang kali.
		d. Program bank Sampah Kelurahan, Disetiap kelurahan akan didirikan bank sampah, dimana warga bisa menukar sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik atau kertas dengan uang atau barang lainnya.
		e. Program Pegendalian Genangan, pemerintah akan memperbaiki dan membangun saluran air serta drainase didaerah-daerah yang sering mengalami genangan atau banjir saat hujan.
		f. Program Sungai Bersih, Pemerintah akan membersihkan sungai-sungai di pontianak dari sampah dan limbah.
		g. Program Subsidi Akses Air Bersih, program ini akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.
		h. Program Pembangunan <i>Inner/Outer Ring Road</i> , pemerintah akan membangun jalan lingkaran dalam dan luar kota (ring road) untuk mengurangi kemacetandi pusat kota.
		i. Program Waterfront, program ini akan melanjutkan pembangunan kawasan tepi sungai (waterfront) di sepanjang sungai kapuas.
		j. Program Penanganan Genangan Air, Pemerintah akan memperbaiki sistem drainase di wilayah yang serig tergenang air saat hujan.
		k. Program Pembangunan Jembatan Garuda, pemerintah akan membangun jembatan garuda yang menghubungkan wilayah-wilayah di pontianak agar warga bisa bergerak lebih cepat dan lancar.
4.	Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif	a. Program Budidaya Ikan dan Hewan Ternak, pemerintah akan memberikan pelatihan dana bantuan bagi warga yang ingin memulai budidaya ikan atau beternak hewan. b. Program Gapoktan Aktif dan Produktif, program ini membantu kelompok tani (gapoktan) agar lebih produktif dalam mengelola lahan pertanian. c. Program Kawasan Kuliner Halal, pemerintah akan mengembangkan kawasan kuliner halal yang



No	Misi	Program Prioritas
		menjadi daya tarik bagi wisatawan.
		d. Program Wisata Urban dan Budaya, program ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di Pontianak melalui pengembangan destinasi wisata kota dan budaya.
		e. Program Pengembangan Kewirausahaan, program ini akan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha.
		f. Program Koperasi Sehat, pemerintah akan membantu koperasi di Pontianak agar lebih efektif dalam mengelola dana dan memberikan keuntungan bagi anggota.
		g. Program Pendampingan BUMD, pemerintah akan mendampingi badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa beroperasi lebih efisien dan produktif.
		h. Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja (<i>E-Business dan E-Commerce</i>), pemerintah akan melatih tenaga kerja di bidang <i>e-business</i> dan <i>e-commerce</i> agar mereka bisa bersaing di era digital.
		i. Program Klinik Inovasi Daerah, program ini akan menyediakan tempat bagi warga yang punya ide-ide inovatif untuk mengembangkan produk baru atau teknologi yang bisa membantu masyarakat.
		j. Program Rumah Layak Huni, pemerintah akan membangun atau memperbaiki rumah-rumah bagi warga yang kurang mampu agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak dan nyaman.
5.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk Mencapai Ketahanan Sosial Budaya	a. Program Kelurahan Tangguh Bencana, program ini bertujuan mempersiapkan setiap kelurahan agar lebih tanggap dalam menghadapi bencana alam seperti banjir atau kebakaran. b. Program Pendidikan Anti Kriminalitas, Pemerintah akan mengadakan program penyuluhan tentang cara-cara mencegah tindakan kriminal, seperti pencurian, narkoba dan tindakan kekerasan. c. Program Fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKUB akan didukung oleh pemerintah untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama



No	Misi	Program Prioritas
		d. Program Penguatan Bangga Kencana, program ini bertujuan untuk memperkuat program keluarga berencana (KB).
		e. Program Perempuan Sebagai Madrasatul Ula (Sekolah Utama dalam Keluarga), program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan sebagai pendidik utama di keluarga.
		f. Program Peningkatan Kualitas SDM Perempuan, program ini memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan, seperti keterampilan menjahit, memasak atau usaha kecil lainnya. Tujuannya adalah memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan bisa membantu perekonomian keluarga.
		g. Program Koordinasi Penyalahgunaan Narkotika, program ini berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi bagi warga terkena dampak narkoba.
		h. Program Peningkatan Internal RT/RW, program ini memberikan insentif kepada RT dan RW agar mereka lebih semangat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya.
		i. Program Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Fardhu Kifayah, pemerintah akan memberikan insentif kepada guru ngaji dan mereka yang membantu pelaksanaan fardhu kifayah.
		j. Program Pengembangan Taman Bermain dan Area Publik, Pemerintah akan membangun lebih banyak taman bermain dan ruang publik di seluruh wilayah pontianak, terutama di Pontianak Utara dan Timur.
		k. Program Fasilitas Olahraga untuk Semua, Pemerintah akan membangun fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh semua warga. Lapangan bola, lapangan bulutangkis dan pusat kebugaran akan disediakan agar warga bisa berolahraga dengan mudah.
		l. Program Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Kegiatan Sosial dan Ekonomi, ruang publik seperti taman dan alun-alun akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi, seperti pasar rakyat, pertunjukkan seni dan acara budaya.
		m. Program Penataan Wilayah Untuk Pemertaan Pembangunan, Pemerintah akan memastikan



No	Misi	Program Prioritas
		pembangunan insfratraktur, seperti jalan, jemabatan dan fasilitas umum, tersebar secara merata diseluruh wilayah pontianak, baik di pusat kota maupun di pinggiran

Sumber data: Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

Berikut ini tabel dukungan pemerintah Kota Pontianak terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional, sebagai berikut:

Tabel 1.10 Dukungan Pemerintah Kota Pontianak Terhadap Asta Cita /Prioritas Nasional

No.	Asta Cita/ Prioritas Nasional	Misi Kota Pontianak/ Prioritas Daerah
Cita 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
Cita 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi
Cita 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	3. Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas
Cita 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif
Cita 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	



No.	Asta Cita/ Prioritas Nasional	Misi Kota Pontianak/ Prioritas Daerah
Cita 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
Cita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM	5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya
Cita 8	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	

Sumber data: Data olahan, 2025

Tabel 1.11 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

Visi: “Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan Yang Humanis”

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	82,22	82,73	83,23	83,73	84,24	84,74	85,25	85,25	
			1.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1.Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI)	%	22,30	21,00	19,60	18,20	16,80	15,40	14,00	14,00	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Perempuan
				2.Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,46	75,83	76,20	76,57	76,94	77,31	77,68	77,68	Dinas Kesehatan
			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.Rata-Rata lama sekolah	Tahun	10,47	10,56	10,65	10,74	10,83	10,92	11,01	11,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,06	15,12	15,18	15,24	15,30	15,36	15,42	15,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3.Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	82,55	83,00	83,15	83,30	83,45	84,00	84,15	84,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			3.Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1.Indeks pembangunan keluarga (IPK)	Indeks	63,15	63,80	64,40	65,00	65,60	66,20	66,80	66,80	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan
				2.Indeks ketimpangan gender (IKG)	Indeks	0,239	0,230	0,220	0,200	0,180	0,160	0,140	0,140	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Perempuan



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				3. Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,04*	69,00	70,50	72,00	74,00	76,00	78,28	78,28	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Perempuan
			4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/A	55,00	55,55	56,00	56,75	57,00	57,85	57,85	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.	Meningkatkan kualitas Tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			Indeks	75,89	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	
			1. Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,54	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50	Sekretariat Daerah
			2. Meningkatnya ASN Yang Berkualitas	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,80	0,81	0,81	0,85	0,85	0,87	0,87	0,87	Badan kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,35	4,40	4,45	4,46	4,47	4,48	4,50	4,50	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan,
				2. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,29	61,40	61,80	62,00	62,30	62,40	62,80	62,80	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			4.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Aset Daerah
			5.Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,49	3,55	3,60	3,70	3,80	3,90	3,98	3,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.Indek Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	2,00	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50	Dinas Komunikasi dan Informatika
			6.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71,04	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pemabngunan Riset dan Inovasi Daerah
			7.Meningkatnya Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	77,72	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50	Inspektorat
3. Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis	1.Meningkat kan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Infratraktur Kota			Indeks	77,77	78,68	79,34	79,86	81,16	81,66	82,41	82,41	
			1.Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kota	1. Indeks Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	Indeks	85,30	86,52	87,16	87,50	89,60	89,90	90,40	90,40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Melalui Penyediaan Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas.				2. Indeks Kualitas Sarana Prasarana Dasar Perkotaan	Indeks	71,60	72,29	72,95	73,60	74,26	74,92	75,88	75,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2. Meningkatnya Kelancaran Transportasi	Rata-rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota	Km/Jam	26,36	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Perhubungan
	2. Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	1. Indeks Risiko Bencana (IRB)			Indeks	84,19	82,69	81,19	79,69	78,19	76,69	75,19	75,19	
			1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,55	0,60	0,63	0,66	0,69	0,70	0,70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif			%	NA	25,11	26,87	28,63	30,38	32,14	33,99	33,99	
			2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	60,71*	60,30	60,49	60,68	60,87	61,07	61,26	61,26	Dinas Ling. Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	87,50	87,50	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	88,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan berdaya saing	1.PDRB Per Kapita			Rp Juta	75,42	77,86	84,50-101,75	125,64-130,64	149,53-157,03	173,40-183,40	192,51-204,51	192,51-204,51	
		2.Rasio Gini			Indeks	0,361	0,343	0,341	0,340	0,338	0,336	0,334	0,334	
		3.Tingkat kemiskinan			%	4,20	4,00	3,79	3,58	3,36	3,15	2,98	2,98	
		4.Indeks Daya Saing Daerah			Angka	4,18	4,20	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	4,26	
			1.Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	72,55	74,15	75,65	77,15	78,65	80,15	81,65	81,65	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			2.Meningkatnya produktivitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5,01-5,20	5,28-5,70	5,30-5,75	5,40-5,80	5,45-5,60	5,50-6,00	5,50-6,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja
			3.Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	1.Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks	0,279	0,274	0,269	0,264	0,259	0,254	0,249	0,249	Dinas Sosial
				2.Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0,139	0,089	0,084	0,079	0,074	0,069	0,064	0,064	Dinas Sosial
			4.Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	1.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	30,65	35,02	36,22	37,09	37,99	40,42	40,88	40,88	Badan Pendapatan Daerah



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib Untuk Mencapai Ketahanan Sosial Dan Budaya				2. Tingkat inflasi	%	1,58	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	Diskumdag
	Mewujudkan kota yang aman, tertib dan harmonis	Angka konflik			Nilai	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	1. Angka Kriminalitas	Angka	19,74	16,03	15,53	15,02	14,54	14,06	13,70	13,70	Satuan Polisi Pamong Praja
			2. Meningkatnya Toleransi Kelompok Masyarakat Kota	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,251	5,300	5,440	5,580	5,720	5,860	6,000	6,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: BAPPERIDA Kota Pontianak, 2025 Catatan: * Data tahun 2023

d. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama lima tahun kedepan.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed- management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan penasehat aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi

mebutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi yang dipilih untuk Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan hubungannya dengan visi dan misi Kota Pontianak tahun 2025-2029 secara matrik dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.12 Penjabaran Strategi pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Misi 1)

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang berdaya saing	1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Penguatan pelayanan kesehatan
		2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan
		3. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan
		4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
		5. Peningkatan kesehatan ibu anak, KB, kesehatan reproduksi, serta percepatan perbaikan gizi masyarakat.
		6. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat
		7. Penguatan pendampingan keluarga berisiko stunting dan Peningkatan kesejahteraan keluarga
		8. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.
		9. Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang ber KB
		10. Meningkatkan penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan
		11. Meningkatkan status perkembangan kelurahan
	2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1. Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Masyarakat
		2. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya wajib belajar 13 tahun
		3. Meningkatkan mutu satuan pendidikan secara fisik dan non fisik
		4. Melakukan peningkatan anggaran pendidikan
		5. meningkatkan akses pendidikan
		6. Membiasakan siswa membaca sejak dini
		7. Memfasilitasi lingkungan belajar yang kondusif
		8. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran
		9. Mendorong diskusi dan refleksi
		10. Memberikan umpan balik dan dukungan
		11. Melakukan latihan-latihan soal
		12. Mengkaitkan pelajaran yang diajarkan
		13. Melaksanakan kegiatan literasi secara berkala



Tujuan	Sasaran	Strategi
		14. Mengkolaborasikan atau mengaitkan pelajaran yang diajarkan
		15. Mengembangkan pelatihan numerasi yang berkesinambungan
		16. Integrasikan literasi dan numerasi
		17. Melakukan Pembelajaran Aktif
		18. Lakukan pelatihan numerasi berkelanjutan
		19. Perbaiki dan kembangkan kurikulum
		20. Mengintegrasikan literasi dalam pelajaran lintas mata pelajaran
	3. Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1. Menurunkan tingkat kelahiran yang tidak direncanakan
		2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana
		3. Meningkatkan Keluarga Sejahtera
		4. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		5. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan
		6. Meningkatkan updating dan validitas data gender dan anak
		7. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
		8. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
	4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	1. Melaksanakan pembinaan terhadap Atlet melalui Organisasi Olahraga (KONI, NPCI dan KORMI) serta melaksanakan Event olahraga secara berjenjang
		2. Melakukan Pembinaan kepada OKP terhadap kegiatan yang di laksanakan, serta mengadakan event Kepemudaan yang Inovatif dan berjenjang.

Tabel 1.13 Penjabaran Strategi pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Misi 2)

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	1. Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum	1. Mengoptimalkan Peningkatan Kebijakan Produk Hukum
	2. Meningkatnya ASN yang Berkualitas	1. Meningkatkan kapastitas dan kompetensi ASN melalui pengembangan metode pelatihan mandiri yang dapat diakses seluruh ASN
		2. Penguatan assesment centre untuk pemetaan jabatan dan rencana suksesi
		3. Penataan promosi, mutasi, dan rotasi berdasarkan potensi, kompetensi, dan rencana suksesi
		4. Meningkatkan kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya.
		5. Meningkatkan integritas ASN serta Pemberian penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja.
		6. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui penataan sarana dan prasarana, evaluasi standar operasional prosedur , serta standar



Tujuan	Sasaran	Strategi
		pelayanan 7. Pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi secara optimal 8. Meningkatkan disiplin pegawai dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan penguatan sanksi pelanggaran disiplin 9. Penguatan kelembagaan manajemen ASN, penyelenggaraan manajemen ASN, serta sistem informasi manajemen ASN untuk menciptakan budaya kerja yang optimal
	3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Mengoptimalkan pemenuhan komponen penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 2. Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3. Mengoptimalkan rumusan kebijakan daerah terkait kebijakan Perekonomian dan SDA 4. Mengoptimalkan rumusan kebijakan daerah terkait administrasi pembangunan ditetapkan menjadi kebijakan daerah 5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi (pencatatan pada E-Pengadaan Langsung, transaksional maupun non transaksional dan e-purchasing) dan pemenuhan SDM JF. PPBJ pada UKPBJ Kota Pontianak 6. Peningkatan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 7. Pengembangan Sistem Informasi Rapat dan Risalet (SiPatRis) 8. Melaksanakan Program Pencatatan Sipil dan Program Pendaftaran Penduduk 9. Melaksanakan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan 10. Pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan prosedur standar yang jelas dan sistematis dalam pengelolaan arsip daerah. 11. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 12. Melaksanakan secara optimal pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan 13. Meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan pembangunan 14. Melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban secara efektif
		15. Melaksanakan secara optimal penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan dan Kelurahan 16. Meningkatkan Lembaga/Masyarakat yang Aktif 17. Meningkatkan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum 18. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 19. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 20. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai ketentuan 21. Mewujudkan masyarakat kecamatan yang berdaya melalui program pemberdayaan masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi
	4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel
	5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatkan Layanan Informasi Publik
		2. Meningkatkan Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
		4. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektor Kota Pontianak
	6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam menindak lanjuti hasil rekomendasi Kemenpan-RB atas evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Pontianak
		2. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien
		3. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
		4. Mengoptimalkan pemenuhan komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak
		5. Menyusun rencana pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		7. Mengoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		8. Melaksanakan pembinaan (sosialisasi, asistensi dan pendampingan) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
		9. Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
		10. Melaporkan kepada pimpinan secara berkala perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
		11. Pengoptimalan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah antar Bidang dengan Arah Kebijakan Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan.
	7. Meningkatnya Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi	1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		2. Meningkatkan kualitas penanganan risiko fraud pada Perangkat Daerah

Tabel 1.14 Penjabaran Strategi pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Misi 3)

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis

Misi 3 : Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas



Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kota	1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana /Relokasi dan Pemanfaatan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
		2. Penyediaan PSU Perumahan
		3. Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (luas di bawah 10 Ha) dan Pencegahan tumbuhnya Permukiman Kumuh Perkotaan
		4. Penyediaan Tanah untuk menunjang Pembangunan
		5. Meningkatkan Pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan kualitas saluran drainase
		6. Meningkatkan Pemeliharaan, Pembangunan dan Peningkatan kualitas jalan dan jembatan melalui intensifikasi pengawasan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala, rekonstruksi, rehabilitasi serta Pembangunan jalan baru
		7. Meningkatkan Pemeliharaan, Pembangunan dan Peningkatan kualitas prasarana sumber daya air kewenangan Kota
		8. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sanitasi aman melalui identifikasi wilayah dengan sanitasi buruk dan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat
		9. Meningkatkan ketersediaan air minum layak melalui peningkatan akses layanan air minum perpipaan
		10. Meningkatkan kualitas Bangunan Gedung Pemerintah melalui intensifikasi pengawasan, pemeliharaan dan peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah, serta Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah
		11. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku jasa konstruksi dalam mendapatkan sertifikat kompetensi kerja
		12. Menambah Luasan RTH Publik dan Mempertahankan RTH Publik yang telah ditetapkan pada RTRW
		13. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai RTRW Kota Pontianak
		14. Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		15. Meningkatkan kualitas perencanaan bangunan gedung dan lingkungan
		16. Pembangunan, peningkatan infrastruktur persampahan serta pengelolaan sistem persampahan regional
	2. Meningkatnya kelancaran transportasi	1. Meningkatkan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak
		2. Meningkatkan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan
		3. Meningkatkan perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas
2. Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Meningkatkan Budaya Sadar Bencana di Wilayah Kota Pontianak melalui Sosialisasi, Edukasi dan Pelatihan bagi masyarakat terutama di daerah rawan bencana
		2. Meningkatkan Penanggulangan Bencana dengan Mengoptimalkan Kapasitas Petugas dan Peningkatan Sarana Prasarana
		3. Meningkatkan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan Mengoptimalkan Kapasitas Petugas DAMKAR dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Non Kebakaran



Tujuan	Sasaran	Strategi
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Pembangunan, peningkatan dan pengelolaan sistem persampahan regional 3. Meningkatkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan dengan menitik-beratkan pada peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengendalian/pencegahan pencemaran air dan udara serta peningkatan usaha pengelolaan sampah secara terpadu. 4. Melakukan Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Melaksanakan Program Keanekaragaman Hayati 5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya 6. Menambah Luasan RTH Publik dan Mempertahankan RTH Publik yang telah ditetapkan pada RTRW 7. Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan 8. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan Ruang terhadap RDTR

Tabel 1.15 Penjabaran Strategi pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Misi 4)

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis

Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inofatif

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing	1. Meningkatnya ketahanan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman 2. Penguatan Distribusi pangan 3. Menggiatkan Urban farming, sekolah pangan, dan pemanfaatan pekarangan produktif. 4. Meningkatkan Pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian 5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 6. Meningkatkan Pelaksanaan penyuluhan Pertanian 7. Pencegahan dan pengendalian dampak perubahan iklim dan organisme pengganggu tanaman 8. asilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 9. Pemanfaatan teknologi dan inovasi termasuk digitalisasi pertanian 10. Terlaksananya pengelolaan program perikanan tangkap 11. Terlaksananya pengelolaan program perikanan budidaya 12. Terlaksananya pengelolaan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 13. Terlaksananya pengelolaan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
	2. Meningkatnya produktivitas	1. Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan melalui Perijinan sesuai ketentuan, peningkatan sarana distribusi



Tujuan	Sasaran	Strategi
	ekonomi	perdagangan, stabilisasi harga, standarisasi dan perlindungan konsumen dan Kebijakan Produk Dalam Negeri 2. Peningkatan Investasi 3. Mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pendidikan 4. Meningkatkan kualitas pendidik dan pemangku budaya 5. Melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat 6. Melakukan Sosialisasi FGD Kebudayaan secara berkala 7. Meningkatkan sarana dan prasarana destinasi wisata, Melakukan pembinaan terhadap POKDARWIS, Pemandu wisata dan Pelaku Usaha Ekraf dengan mengadakan Workshop/Sosialisasi dan peningkatan sarana dan prasarana Destinasi Wisata 8. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pendataan, Kemitraan, dan Motivasi kewirausahaan 9. Peningkatan Pengelolaan Usaha Koperasi melalui perijinan sesuai ketentuan, monitoring dan evaluasi implementasi peraturan pengelolaan koperasi 10. Mengoptimalkan Pertumbuhan pendapatan BUMD 11. Mengumpulkan data lowongan pekerjaan dan mendorong Perusahaan untuk melaporkan data penempatan baik secara online maupun offline 12. Memberikan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan keterampilan lunak (soft skills) pekerja. Program pelatihan yang terarah akan membuat pekerja lebih terampil dan lebih produktif. 13. Menyediakan kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan karier mereka melalui pendidikan lanjutan atau sertifikasi profesional, yang dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih efisien. 14. Menghubungkan pencari kerja dengan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi pencari kerja. Strategi yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
	3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	1. Pembinaan dan monitoring evaluasi kompetensi PSKS 2. Menjalin mitra kerja dan kerjasama dengan lembaga masyarakat 3. Melakukan Optimalisasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal 4. Meningkatkan taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial 5. Penyaluran Bantuan sosial tepat sasaran 6. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kpd korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan 7. Hubungan industrial yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi perkembangan perusahaan serta kesejahteraan pekerja. 8. Menghubungkan pencari kerja dengan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi pencari kerja. Strategi yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat



Tujuan	Sasaran	Strategi
		pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
	4. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	1. Meningkatkan pengawasan pajak daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak 3. Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan melalui Perijinan sesuai ketentuan, peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga, standarisasi dan perlindungan konsumen dan Kebijakan Produk Dalam Negeri 4. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi 5. Meningkatkan kualitas basis data 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 7. Penyelarasan dan Penguatan Regulasi 8. Meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan akselerasi dalam rangka pemungutan pajak dengan Pihak Terkait 9. Melakukan Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan 10. Menyusun prosedur yang tertulis dan legal
		11. Melalui UU Nomor 1 HKPD Tahun 2022 Pemerintah Daerah dapat menentukan tarif pajak dan retribusi disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal 12. Pemerintah Daerah dapat menggandeng investor untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PAD yang tidak dapat dibiayai Pemerintah 13. Reformasi birokrasi dengan penyederhanaan birokrasi dan pemanfaat teknologi digital dalam pelayanan terkoneksi saluran Perbankan dan market place 14. Penyelarasan regulasi 15. Melakukan pengawasan secara rutin baik dilakukan oleh OPD terkait maupun secara kolaborasi dengan opd dilingkungan Pemkot Pontianak dan bersinergi dengan instansi lain

Tabel 1.16 Penjabaran Strategi pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Misi 5)

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis

Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan kota yang aman tertib dan harmonis	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	1. Melakukan Penindakan yang Tegas terhadap Pelanggaran 2. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat 3. Melakukan Kolaborasi dengan Instansi Terkait 4. Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Anggota Satpol PP 5. Melakukan Penguatan Peran Masyarakat dalam Penegakan Ketertiban 6. Melakukan Pendekatan Humanis dan Dialogis



Tujuan	Sasaran	Strategi
	2. Meningkatnya Toleransi Kelompok Masyarakat Kota	1. Menilai tingkat toleransi dan harmoni antar umat beragama di suatu wilayah melalui Edukasi dan Penyuluhan, Kebijakan dan Regulasi, Kegiatan Sosial dan Kultural, Komunikasi dan Media, Peran Pemimpin dan Tokoh Agama, Monitoring dan Evaluasi dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan indeks kerukunan umat beragama dapat meningkat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Sumber: Rekap data Perangkat Daerah

e. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pembangunan Kota Pontianak tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2030 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2030, dimana segala kebijakan pembangunan harus mengacu pada dokumen tersebut. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2030 dan dokumen RKPD Kota Pontianak Tahun 2025, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak Tahun 2025 yaitu:

1) Program Prioritas Daerah Kota Pontianak Tahun 2025

Program prioritas pembangunan ditetapkan sesuai dengan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam beberapa sasaran pembangunan, yakni:

Tabel 1.17 Penjabaran Program Prioritas Daerah Kota Pontianak

SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)		SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)	
1		2	
Prioritas 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan PeroranganDan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan PeroranganDan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia Kesehatan



SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)		SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)	
1		2	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	6	Program Penanganan Kerawanan Pangan
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	7	Program Pengawasan Keamanan Pangan
Sasaran 2: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan serta Pengembangan Budaya			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
8	Program Pengelolaan Pendidikan	8	Program Pengelolaan Pendidikan
9	Program Pengelolaan Pendidikan	9	Program Pengelolaan Pendidikan
10	Program Pengelolaan Pendidikan	10	Program Pengelolaan Pendidikan
11	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	11	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
12	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	12	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
13	Program Pengembangan Kebudayaan	13	Program Pengembangan Kebudayaan
14	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	14	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
15	Program Pembinaan Sejarah	15	Program Pembinaan Sejarah
16	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	16	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
17	Program Pengelolaan Permuseuman	17	Program Pengelolaan Permuseuman
Sasaran 3: Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	18	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
19	Program Perlindungan Perempuan	19	Program Perlindungan Perempuan
20	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	20	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
21	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	21	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
22	Program Perlindungan Khusus Anak	22	Program Perlindungan Khusus Anak
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Program Pengendalian Penduduk	23	Program Pengendalian Penduduk
24	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	24	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
25	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	25	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas dan Prestasi Pemuda dan Olahraga			
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga



SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)		SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)	
1		2	
26	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	26	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
27	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
28	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	28	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Prioritas 2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan			
Sasaran 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Drainase Perkotaan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
30	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	30	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
31	Program Pengembangan Permukiman	31	Program Pengembangan Permukiman
32	Program Penyelenggaraan Jalan	32	Program Penyelenggaraan Jalan
Sasaran 6: Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Air Minum			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	33	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
34	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	34	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Program Penataan Bangunan Gedung	35	Program Penataan Bangunan Gedung
36	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	36	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Lingkungan Permukiman			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
37	Program Pengembangan Perumahan	37	Program Pengembangan Perumahan
38	Program Kawasan Permukiman	38	Program Kawasan Permukiman
39	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	39	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
40	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	40	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
41	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	41	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
42	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	42	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
43	Program Pengelolaan Tanah Kosong	43	Program Pengelolaan Tanah Kosong
44	Program Penatagunaan Tanah	44	Program Penatagunaan Tanah
Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Transportasi			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)		SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)	
1		2	
46	Program Pengelolaan Pelayaran	46	Program Pengelolaan Pelayaran
Prioritas 3: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			
Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
	Sekretariat Daerah		Sekretariat Daerah
47	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	47	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
48	Program Perekonomian Dan Pembangunan	48	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Inspektorat Daerah		Inspektorat Daerah
49	Program Penyelenggaraan Pengawasan	49	Program Penyelenggaraan Pengawasan
50	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	50	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
51	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	51	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
52	Program Aplikasi Informatika	52	Program Aplikasi Informatika
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
54	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	54	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Sasaran 11: Meningkatnya Profesionalisme ASN			
	Kepegawaian		Kepegawaian
55	Program Kepegawaian Daerah	55	Program Kepegawaian Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan
56	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	56	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sasaran 12: Meningkatnya Perencanaan, Pengukuran dan Capaian Kinerja			
	Perencanaan		Perencanaan
57	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	57	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
58	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	58	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penelitian dan Pengembangan		Penelitian dan Pengembangan
59	Program Penelitian dan pengembangan daerah	59	Program Penelitian dan pengembangan daerah
Sasaran 13: Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat			
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60	Program Pendaftaran Penduduk	60	Program Pendaftaran Penduduk
61	Program Pencatatan Sipil	61	Program Pencatatan Sipil
62	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
63	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	63	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Sekretariat DPRD		Sekretariat DPRD
64	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	64	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
65	Program Pembinaan Perpustakaan	65	Program Pembinaan Perpustakaan
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan



SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)		SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)	
1		2	
66	Program Pengelolaan Arsip	66	Program Pengelolaan Arsip
67	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	67	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	Kecamatan		Kecamatan
68	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	68	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
69	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	69	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
70	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	70	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
71	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sasaran 14: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan			
	Keuangan		Keuangan
72	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	72	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
73	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	73	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran 15: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sekretariat Daerah		Sekretariat Daerah
74	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	74	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
75	Program Perekonomian Dan Pembangunan	75	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Keuangan		Keuangan
76	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	76	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Prioritas 4: Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat			
Sasaran 16: Meningkatnya Sektor Pertanian dan Perikanan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
77	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	77	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
78	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	78	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
79	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	79	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
80	Program Penyuluhan Pertanian	80	Program Penyuluhan Pertanian
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
81	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	81	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
82	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	82	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
83	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	83	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sasaran 17: Meningkatnya Sektor Perdagangan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
84	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	84	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	85	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)		SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)	
1		2	
86	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	86	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
87	Program Pengembangan Ekspor	87	Program Pengembangan Ekspor
88	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	88	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
89	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	89	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Sasaran 18: Meningkatnya Sektor Industri			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
90	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	90	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
91	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	91	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
92	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	92	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Sasaran 19: Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro			
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
93	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	93	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
94	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	94	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
95	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	95	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
96	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	96	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
97	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	97	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
98	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	98	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
99	Program Pengembangan UMKM	99	Program Pengembangan UMKM
Sasaran 20: Meningkatnya Investasi Daerah			
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
100	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
101	Program Promosi Penanaman Modal	101	Program Promosi Penanaman Modal
102	Program Pelayanan Penanaman Modal	102	Program Pelayanan Penanaman Modal
103	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	103	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
104	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	104	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Sasaran 21: Meningkatnya Sektor Pariwisata			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
105	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	105	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
106	Program Pemasaran Pariwisata	106	Program Pemasaran Pariwisata
107	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	107	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual



SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)		SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)	
1		2	
108	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	108	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran 22: Menurunnya Angka Kemiskinan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
109	Program Pemberdayaan Sosial	109	Program Pemberdayaan Sosial
110	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	110	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
111	Program Rehabilitasi Sosial	111	Program Rehabilitasi Sosial
112	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	112	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
113	Program Penanganan Bencana	113	Program Penanganan Bencana
114	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	114	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
115	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	115	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Sasaran 23: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja			
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
116	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	116	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja
117	Program Penempatan Tenaga Kerja	117	Program Penempatan Tenaga Kerja
118	Program Hubungan Industrial	118	Program Hubungan Industrial
Prioritas 5: Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan			
Sasaran 24: Menurunnya Pencemaran Lingkungan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
119	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	119	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
120	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	120	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
121	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	121	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
122	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	122	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
123	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	123	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
124	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	124	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
125	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	125	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan



SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD)		SASARAN PEMBANGUNAN/ PROGRAM PRIORITAS DAERAH (RKPD)	
1		2	
			Hidup Untuk Masyarakat
126	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	126	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
127	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	127	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
128	Program Pengelolaan Sampah	128	Program Pengelolaan Sampah
Sasaran 25: Meningkatnya Kualitas Tata Ruang			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
129	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	129	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
130	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	130	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
131	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	131	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sasaran 26: Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat			
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
132	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	132	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran 27: Meningkatnya Toleransi Dikalangan Masyarakat			
	Kesatuan Bangsa dan Politik		Kesatuan Bangsa dan Politik
133	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	133	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
134	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	134	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
135	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	135	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
136	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	136	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
137	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	137	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Sasaran 28: Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran			
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
138	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	138	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
139	Program Penanggulangan Bencana	139	Program Penanggulangan Bencana

Sumber : Bappeda Kota Pontianak Tahun 2025

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan Absolut dan ada Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Urusan Sosial. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM terdiri dari :

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar sesuai kewenangannya, melaksanakan pengumpulan dan pendataan secara berkala.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan atau jasa dan sarana dan atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya dan melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pelaporan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota menyampaikan laporan SPM daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis



Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standaar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 1188 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah atau ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk mencapai sasaran meningkatnya aksabilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem



yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar Pelayanan Minimal di Kota Pontianak telah dituangkan secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang kemudian menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Pontianak menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan/keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Arah Kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun periode pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikatpr Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja 2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks pembangunan Manusia	82,22	82,80	0,71	%
2	Angka Kemiskinan	4,20	4.0	-4,76	%
3	Angka Pengangguran	8,29	7,91	-4,58	%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,34	6,16	%
5	Pendapatan Per Kapita	75.420.043	80.794.000	7,13	Rupiah
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,361	0,379	4,99	%

Sumber data :BPS Kota Pontianak tahun terbit 2026

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data dan informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	47,57%	DISDIKBUD	
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	84,52%	DISDIKBUD	
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,71%	DISDIKBUD	
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	62,54%	DISDIKBUD	
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	62,95%	DISDIKBUD	
2	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,14%	DINKES	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	8,36%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	75,64%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	79,86%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	83,04%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	67,35%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	99,63%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	53,39%	DINKES	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,24%	DINKES	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	84,15%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	72,02%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	82,22%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100%	DINKES	
3	Pekerjaan Umum	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	0/1	PUPR	
		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	91,34%	PUPR	
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	21,96%	PUPR	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98%	PUPR	
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	27,35%	PUPR	
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	0/1	PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	54,43%	PUPR	
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	66,67%	PUPR	
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	62,15%	PUPR	
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	88,71%	PUPR	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	PERKIM	
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	14,84%	PERKIM	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	22,21%	PERKIM	
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	69,68%	PERKIM	
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100%	BPBD	
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	SATPOL PP	
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	SATPOL PP	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	BPBD	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	DINSOS	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	DINSOS	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	DINSOS	
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	DINSOS	
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%	DINSOS	
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	76,69%	DINSOS	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	98,88%	TENAGA KERJA	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	99,95%	TENAGA KERJA	
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100%	TENAGA KERJA	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	DP2KBP3A	
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	DP2KBP3A	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
9	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	108,84%	DPPP	
10	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	75,12%	PERKIM	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	42,83%	PERKIM	
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	100%	PERKIM	
11	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	DLH	
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	74,81%	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	97,35%	DUKCAPIL	
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	69,99%	DUKCAPIL	
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100%	DUKCAPIL	
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98,34%	DUKCAPIL	
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	DUKCAPIL	
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	73,08%	DUKCAPIL	
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	76,12%	DUKCAPIL	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0/1	DP2KBP3A	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	0/1	DP2KBP3A	
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	0/1	DP2KBP3A	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	80,19%	DP2KBP3A	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	58,81%	DP2KBP3A	
		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	39,71%	DP2KBP3A	
15	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,75 Rasio	DISHUB	
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,61 Rasio	DISHUB	
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	12,50%	DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	78,13%	DISKOMINFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	48,89%	DISKOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	DISKOMINFO	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	1,33%	DISKUMDAG	
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100%	DISKUMDAG	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-6,95%	PTSP	
		Realisasi total terhadap target investasi	170,40%	PTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	15%	DISPORAPAR	
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,38%	DISPORAPAR	
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	8,93%	DISPORAPAR	
		Persentase jumlah atlet berprestasi	11,85%	DISPORAPAR	
20	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	98,13%	DISKOMINFO	
21	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	54,9%	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100%	DISDIKBUD	
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	27,27	DISDIKBUD	
23	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	62,11	ARPUSDA	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	34,85	ARPUSDA	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	81,87	ARPUSDA	
25	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	105,85%	DPPP	
		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	50.61 Kg / Kap / Tahun	DPPP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
26	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	2,07%	DISPORAPAR	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	53,08%	DISPORAPAR	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	14,30%	DISPORAPAR	
27	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	-8,17%	DPPP	
		Peningkatan produksi hortikultura	3,71	DPPP	
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	-21,09%	DPPP	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100%	DPPP	
28	Kehutanan	-	-	-	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	-	
30	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	DISKUMDAG	
31	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	61,97%	DISKUMDAG	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota			
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	0,49%	DISKUMDAG	
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	1,33%	DISKUMDAG	
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	8,27%	DISKUMDAG	
32	Transmigrasi	-	-	-	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100%	BAPERIDA	
2	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	33,57%	BKAD	
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	36,42%	BAPENDA	
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap	65,93%	BKAD	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N			
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	45,02%	BKAD	
2	Kelembagaan, Kepegawaian dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80,29%	BKPSDM	
3	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5 Nilai	INSPEKTORAT	
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	4 Nilai	INSPEKTORAT	
		Manajemen risiko Indeks	5 Nilai	INSPEKTORAT	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	100%	INSPEKTORAT	
4	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40 Poin	SEKDA	
		Pemanfaatan sistem pengadaan	22,32 Poin	SEKDA	
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	18,62 Poin	SEKDA	
5	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	BKAD	
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	42,31%	SETDA	
6	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	86,43 nilai	SETDA	
7	Penelitian dan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah	100%	BAPERIDA	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pengembangan	menjadi bagian dari program kegiatan			

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Dalam sub bab ini disajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran Kota Pontianak Tahun 2025 juga menyajikan capaian kegiatan tahun 2025 yang dibiayai dari dana APBD Kota Pontianak.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja. Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.4

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Interval	Kategori
>85	Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	Berhasil



$55 < \bar{x} \leq 70$	Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target Kinerja/Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan dan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji pimpinan suatu instansi untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola instansi tersebut.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (bawahan) dengan pemberi amanah (atasan langsung); (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024, telah disusun dalam dokumen perencanaan tahunan yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024. Target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
1		Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia yang Berkesetaraan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81.60
	1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.	Angka Harapan Hidup	73.74 Tahun
			3.	Angka Stunting Balita	13 %
	2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Serta Pengembangan	4.	Indeks Pendidikan	0,769



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
		Kebudayaan			
	3.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	5.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,93%
	4.	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	6.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,25%
			7.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya
	5.	Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda	8.	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	49,16%
2.		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib	9.	Indeks Infrastruktur	90.66
			10.	Indeks Resiko Berencana	70,09
	6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	11.	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	91,32%
			12.	Pengurangan Luas Genangan	24%
			13.	Persentase Akses Air Minum Aman	13%
			14.	Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi baik	75%
			15.	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak	88,06%
	7.	Meningkatnya Kualitas Transportasi dan Kelancaran Berlalu Lintas	16.	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035
	8	Terwujudnya Kota yang bersih Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.90%
	9.	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban Keamanan Kota	18.	Indeks Ketahanan Daerah	0.55
	10.	Meeningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	19.	Indeks Kota Toleran	4.95
	3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	20.	Indeks Reformasi Birokrasi	75 (BB)



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
		yang baik			
	11.	Meningkatnya Profesioanalisme ASN	21.	Indeks Profesional ASN	73%
	12.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	22.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
	13.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Akuntabel	23.	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
	14.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memamfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	24.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik
	15.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	25.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	81 (A)
4		Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan	26.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	6.58
	16.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	27.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,2%
			28.	Tingkat Inflasi	3±1
	17.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	29.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20-10,20%
	18.	Menurunnya Kemiskinan	30.	Tingkat Kemiskinan	4,2-4,3
			31.	Gini Rasio	0,317
	19.	Meningkatnya Daya Saing Kota, melalui Inovasi dan Kolaborasi	32.	Indeks Daya Saing Daerah	3,80 (sangat Tinggi)

B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.6

Capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN%	KET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
I	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia yang Berkesetaraan	I	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,60%	82,80%	101,47%	Sangat Berhasil
	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	73,74 Tahun	75,96 Tahun	103,01%	Sangat Berhasil
		2.	Angka Stunting Balita	13 %	7,57%	171,75%	Sangat Berhasil
	2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Serta Pengembangan Kebudayaan	3.	Indeks Pendidikan	0,769	0,77	100,13%	Sangat Berhasil
	3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,93%	1.06	103,97%	Sangat Berhasil
	4. Meningkatkan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	5.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,25%	94.80%	100,53%	Sangat Berhasil
		6.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%	Sangat Berhasil
II.	5. Meningkatkan Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda	7.	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	49,16%	49,75%	101%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib	I.	Indeks Infrastruktur	90,66	72,23	79,67%	Berhasil
		II.	Indeks Resiko Berencana	70,09	84,19	83,25%	Berhasil
	6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	8.	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	85,89%	88,79%	103,46%	Sangat Berhasil
		9.	Pengurangan Luas Genangan	24%	23,9%	99,58%	Sangat Berhasil
		10.	Persentase Akses Air Minum Aman	13%	31,89%	245,31%	Sangat Berhasil
		11.	Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi	75%	84,5%	112,66%	Sangat Berhasil



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN%	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
				baik				
			12	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak	76,60%	80,43	105%	Sangat Berhasil
	7.	Meningkatnya Kualitas Transportasi dan Kelancaran Ber Lalu Lintas	13	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035 Jam	0,038 Jam	91,43%	Sangat Berhasil
	8	Terwujudnya Kota yang bersih Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,90%	65,69%	102,80%	Sangat Berhasil
	9.	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban Keamanan Kota	15	Indeks Ketahanan Daerah	0.55	0,59%	107,27%	Sangat Berhasil
	10	Meeningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	16	Indeks Kota Toleran	4.95	5,251	106,08	Sangat Berhasil
III	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		I..	Indeks Reformasi Birokrasi	75 (BB)	75,89 Tahun 2024	101,18%	Sangat Berhasil
	11	Meningkatnya Profesioanalisme ASN	17	Indeks Profesional ASN	73%	78,5	107,05	Sangat Berhasil
	12	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Berhasil
	13	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Akuntabel	19	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil
	14.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memamfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	20.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik (2,6-3,5)	Sangat Baik (3,73)	100%	Sangat Berhasil
	15.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	81 (A)	71,82 (BB)	88,66%	Sangat Berhasil
iv	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan		I.	Indeks Pembangunan Ekonomi	6,58			
	16.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	22	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,2%	5,34	105%	Sangat Berhasil



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN%	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			23	Tingkat Inflasi	3±1%	1,58%	100%	Sangat Berhasil
	17.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	24	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,20-10,20%	7,91	103,67%	Sangat Berhasil
	18.	Menurunnya Kemiskinan	25	Tingkat Kemiskinan	4,2-4,3%	4	107%	Sangat Berhasil
			26	Gini Rasio	0,317	0,379	110,04%	Sangat Berhasil
	19.	Meningkatnya Daya Saing Kota, melalui Inovasi dan Kolaborasi	27.	Indeks Daya Saing Daerah	3,80	4,15	109,21%	Sangat Berhasil



C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2025 sebesar 27 Indikator Kinerja. Berdasarkan Penetapan Keputusan Wali Kota Nomor : 768 /BAPPEDA/Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				REALISASI TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Indeks Pembangunan Manusia (IKM)	81,60%	82,80%	101,47%	Sangat Berhasil	82,80%
1.	Angka Harapan Hidup	14 %	75,96 Tahun	171,75%	Sangat Berhasil	75,96 Tahun
2.	Angka Stunting Balita	0,768	7,57%	180,59%	Sangat Berhasil	7,57%
3.	Indeks Pendidikan	0,94%	0,77	100,13%	Sangat Berhasil	0,77%
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	94,20%	1,06%	102,3%	Sangat Berhasil	1,06%
5.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,20%	94,80	100,53	Sangat Berhasil	94,80
6.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nidya	100%	Sangat Berhasil	Nindya
7.	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	46,70%	49,75%	101%	Sangat Berhasil	49,75%
II	Indeks Infrastruktur	90,66	72,23	79,67	Berhasil	72,23
III	Indeks Resiko Berencana	70,09	50,09	71,46	Sangat Berhasil	50,09
8.	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	91,32%	88,79%	97,22%	Sangat Berhasil	88,79%
9.	Pengurangan Luas Genangan	24%	23,9%	99,58%	Sangat Berhasil	23,9%
10.	Persentase Akses Air Minum Aman	13%	31,98%	245%	Sangat Berhasil	31,98%
11.	Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi baik	75%	84,5%	112%	Sangat Berhasil	84,5%
12.	Persentase Lingkungan	88.06%	99,79%	113%	Sangat	99,79%



	Permukiman yang Layak				Berhasil	
13.	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035 jam	0,038 jam	91,43%	Sangat Berhasil	0,038 Jam
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,90%	65,69%	102,80%	Sangat Berhasil	65,69%
15.	Indeks Ketahanan Daerah	0,55	0,59	107,27%	Sangat Berhasil	0,59
16.	Indeks Kota Toleran	4,95	4,75	95,96%	Sangat Berhasil	4,75
IV	Indeks Reformasi Birokrasi	75 (BB)	75,89 Tahun 2024	101,18	Sangat Berhasil	75,89 Tahun 2024
17.	Indeks Profesional ASN	73	78,5	100,64%	Sangat Berhasil	78,5
18.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Berhasil	Sangat Baik
19.	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	Sangat Berhasil	WTP
20.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik (2,6-3,5)	Sangat Baik (3,73)	100%	Sangat Berhasil	Sangat Baik (3,73)
21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	81 (A)	71,82 (BB)	88,66%	Sangat Berhasil	71,82 (BB)
V	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	6,58	n/a	n/a	n/a	n/a
22.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.5-5.1%	5,34%	105%	Sangat Berhasil	5,34
23.	Tingkat Inflasi	3±1%	1,58%	100%	Sangat Berhasil	1,58%
24.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,35-10,25%	7,91	103,67%	Sangat Berhasil	7,91%
25.	Tingkat Kemiskinan	4,3-4,4%%	4%	107%	Sangat Berhasil	4%
26.	Gini Rasio	0,322	0,379	110,495%	Sangat Berhasil	0,379
27.	Indeks Daya Saing Daerah	3,76	4,15	109,21%	Sangat Berhasil	4,15 (sangat tinggi)

D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2025 dibandingkan dengan RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025				REALISASI TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Indeks Pembangunan Manusia (IKM)	81,60%	82,80%	101,47%	Sangat Berhasil	82,80%
1.	Angka Harapan Hidup	73,74 Tahun	75,96 Tahun	171,75%	Sangat Berhasil	75,96 Tahun
2.	Angka Stunting Balita	14 %	7,75%	180,59%	Sangat Berhasil	14%
3.	Indeks Pendidikan	0,768	0,767	99,87%	Sangat Berhasil	0,768%
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,94%	0,92%	102,3%	Sangat Berhasil	0,94%
5.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,20%	94,65%	100,48	Sangat Berhasil	94,2%
6.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%	Sangat Berhasil	Nindya
7.	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	46,70%	48,03	102,85%	Sangat Berhasil	46,70%
II	Indeks Infrastruktur	90,66	72,23	79,67	Berhasil	72,23
III	Indeks Resiko Berencana	70,09	50,09	71,46	Sangat Berhasil	50,09
8.	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	90,42%	90,64%	100,24%	Sangat Berhasil	90,42%
9.	Pengurangan Luas Genangan	28%	26,30%	93,93%	Sangat Berhasil	28%
10.	Persentase Akses Air Minum Aman	11%	2,58%	241,6%	Sangat Berhasil	11%
11.	Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi baik	70%	91,42%	130,6%	Sangat Berhasil	70%
12.	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak	86,95%	92,28%	106,14%	Sangat Berhasil	86,95%
13.	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0,035 Jam	0,038 Jam	91,43%	Sangat Berhasil	0,035 Jam
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,30	65,69	107,24%	Sangat Berhasil	60,30%
15.	Indeks Ketahanan Daerah	0.55	0,59	110%	Sangat Berhasil	0,50
16.	Indeks Kota Toleran	4.85	5,45%	112,37%	Sangat Berhasil	4,85%



IV	Indeks Reformasi Birokrasi	75 (BB)	75,89 Tahun 2024	101,18	Sangat Berhasil	75,89 Tahun 2024
17.	Indeks Profesional ASN	71%	78%	109,86%	Sangat Berhasil	71%
18.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Berhasil	100%
19.	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	Sangat Berhasil	WTP
20.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	100%	Sangat Baik	Baik
21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	80 (A)	71,82 (BB)	88,80%	Sangat Berhasil	80 (A)
v	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	6,58				
22.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,1%	5,03	98,63	Sangat Berhasil	4,5-5,1%
23.	Tingkat Inflasi	3±1%	1,58%	100%	Sangat Berhasil	3±1%
24.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,35-10,25%	8,29%	100,72%	Sangat Berhasil	8,35-10,25%
25.	Tingkat Kemiskinan	4,3-4,4%	4,2%	102,38%	Sangat Berhasil	4,3-4,4%
26.	Gini Rasio	0,322	0,379	117,70%	Sangat Berhasil	0,379
27.	Indeks Daya Saing Daerah	3,76 (sangat Tinggi)	3,79 (sangat tinggi)	100,80%	Sangat Berhasil	3,76 (sangat Tinggi)

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI		
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	151.768.830.318	141.093.196.345	7,035	103,01%
		Angka Stunting Balita	935.172.700	783.293.739	83,76%	171,75%
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Serta Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pendidikan	167.864.886.258	138.369.789.569	17,57%	100,13%
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2.953.728.700	2.828.882.654	4,22%	113,97%
4	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	1.135.587.700	961.735.200	15,31%	100,53%
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak				
5	Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	8.302.354.307,14	7.235.945.400	12,84%	101%
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	143.874.577.866	117.703.806.627	18,19%	103,46%
		Pengurangan Luas Genangan	91.285.846.699	87.821.259.619	3,80%	100,41%
		Persentase Akses Air Minum Aman	33.196.472.818	31.656.524.496	4,64%	245,31%
		Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi	33.021.832.601	30.358.410.455	8,07%	112,66%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI		
		baik				
		Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak	4.232.270.160	4.170.451.745	1,46%	113%
7	Meningkatnya Kualitas Transportasi dan Kelancaran Berjalan Lintas	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	41.226.408.621	40.353.167.353	2.11%	97.10%
8	Terwujudnya Kota yang bersih Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2.651.976.450	2.477.068.563	93,40%	102,80%
9	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Daerah	8.243.348.789	6.707.657.663	18,63	106,08%
10	Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran	6.657.687.375	6.614.939.125	0,64%	106,08%
11	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesional ASN	6.185.437.821	6.157.619.038	0,44%	107,05%
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	65.355.628.214	60.641.195.990	7,21%	100%
13	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	31.063.355.617	28.601.911.961	7,923%	100%
14	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memamfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.837.398.086	2.644.051.449	6,81%	100 %
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	282.547.500	270.536.265	4,25%	88.67%
16	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	26.301.138.162	24.281.300.479	7.68%	105%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI		
		Tingkat Inflasi	1.514.860.979	1.345.838.678	11,16%	100%
17	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.171.282.221	5.724.976.895	7,23%	103,67%
18	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6.289.255.640	5.660.164.611	10%	100%
		Gini Rasio	6.289.255.640	5.660.164.611	10%	119,55%
19	Meningkatnya Daya Saing Kota, melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	369.698.600	359.718.950	5,43%	109,21%

Tabel 2.10
Efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI		
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	110.541.809.795	96.559.918.117	12.65%	87.35%
		Angka Stunting Balita	2.151.851.600	2.112.654.035	1.82%	98.18%
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Serta Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pendidikan	189.028.261.752	155.549.600.725	17.71%	82.29%
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2.953.728.700	2.828.882.654	4.23%	95.77%
4	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	1.067.240.366	1.025.214.061	3.94%	96.06%
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak				

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI		
5	Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga dan Pemuda	Persentase Atlet Olahraga dan Pemuda yang berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional dan Internasional	7.896.703.465	7.344.151.681	7.00%	93.00%
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase Infrastruktur Jalan Mantap	161.557.740.151	139.738.037.998	13.51%	86.49%
		Pengurangan Luas Genangan	28.529.886.615	27.963.360.398	1.99%	98.01%
		Persentase Akses Air Minum Aman	32.202.609.344	31.968.522.769	0.73%	99.27%
		Persentase Fasilitas Pemerintah dalam Kondisi baik	37.303.229.566	34.227.543.094	8.25%	91.75%
		Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak	190.681.292.681	171.824.014.729	9.89%	90.11%
7	Meningkatnya Kualitas Transportasi dan Kelancaran Berjalan Lintas	Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	38.965.784.957	38.082.105.866	2.27%	97.73%
8	Terwujudnya Kota yang bersih Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	87.472.314.041	84.495.473.934	3.40%	96.60%
9	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Daerah	3.828.720.826	3.273.365.124	14.50%	85.50%
10	Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran	38.063.841.925	38.008.531.300	0.15%	99.85%
11	Meningkatnya Profesioanalisme ASN	Indeks Profesional ASN	5.866.911.050	5.300.522.535	9.65%	90.35%
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	106.868.015.319	99.554.920.204	6.84%	93.16%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		EFISIENSI ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET	REALISASI		
13	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	13.373.322.342	10.649.193.755	20.37%	79.63%
14	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memamfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.848.887.017	4.686.270.600	3.35%	96.65%
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	7.542.190.648	6.490.094.110	13.95%	86.05%
16	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	26.301.138.162	24.281.300.479	7.68%	92.32%
		Tingkat Inflasi	1.043.886.645	635.188.222	39.15%	60.85%
17	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.645.988.100	1.197.286.600	27.26%	72.74%
18	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	3.009.845.400	2.860.120.141	4.97%	95.03%
		Gini Rasio	4.494.823.260	4.156.534.500	7.53%	92.47%
19	Meningkatnya Daya Saing Kota, melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	7.632.825.100	6.571.080.500	13.91%	86.09%

F. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun 2025 yang mendukung tercapainya target kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11

Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun 2025 yang mendukung tercapainya target kinerja

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	149.808.217.402	139.318.933.764	92,99%
	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	897.366.198.	857.905.935	95,60%
	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	744.504.460	678.911.736	91,19%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	318.742.258.	237.444.910	74,49%
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	762.826.400	752.349.150	98,86%
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.853.523.716	1.643.370.923	88,66%
2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan serta Pengembangan Budaya	Program Pengelolaan Pendidikan	167.756.980.758	162.907.034.357	97,11%
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	107.905.500	97.610.121	90,46%
	Program Pengembangan Kebudayaan	2.911.452.170	2.844.898.208	97,71%
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	59.458.000	58.639.000	98,62%
3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	352.600.000	341.746.290	96,92%
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.853.523.716.	1.643.370.923	88,66%
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	762.826.400	752.349.100	98,63%
4. Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak	Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	71.710.000	68.547.000	95,59%
	Program Perlindungan Perempuan	30.728.000	30.378.000	98,80%
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	11.130.000	11.080.000	99,55%
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	226.360.100	198.092.600	87,51%
	Program Perlindungan khusus anak	795.659.600	653.637.600	82,15%
5. Meningkatnya prestasi atlit olahraga dan pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan	1.170.141.950	586.691.800	50,14%
	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Keolahragaan	5.662.070.407,14	5.612.561.800	99,13%
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000	150.000.000	100%
6. Meningkatnya	Program penyelenggaraan jalan	143.874.577.886	117.703.806.627	81,81%



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
kualitas infrastruktur perkotaan	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	59.780.796.155	56.497.917.070	94,51%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase	31.505.050.514.	31.323.342.549	99,42%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	33.196.472.818.	31.656.524.496	95,36%
	Program Penataan Bangunan Gedung	33.021.832.601	30.358.410.455	91,93%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	534.988.000	336.570.600	62,91%
	Program Pengembangan Perumahan	3.319.647.440	3.194.032.484	96,21%
	Program Kawasan Permukiman	7.719.336.310	7.579.785.960	98,19%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.478.119.000	3.377.346.000	97,10%
	Program peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum	159.884.472.478,70	156.062.818.776	97,60%
	Program Penyelesaian sengketa tanah Garapan	172.070.000	127.085.000	73,86%
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	23.156.535.000	8.968.844.450	38,73%
7. Meningkatnya kualitas transportasi dan kelancaran lalu lintas	Program Penyelenggarakan Lalu lintas dan angkutan jalan	40.169.775.441	.39.383.201.123	98,04%
	Program pengelolaan pelayanan	1.056.633.180	969.966.230	91,79%
8. Terwujudnya kota yang bersih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	127.555.000	120.274.082	94,29%
	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.045.518.050	1.022.057.768	97,76%
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	246.566.300	241.115.859	97,79%
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	119.105.400	113.617.490	95,39%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	205.977.500	157.124.736	76,28%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	707.931.400	667.170.073	94,24%
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	197.010.700	183.132.457	92,96%
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	121.417.500	86.193.597	70,99%



SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pengelolaan sampah	69.387.276.533	58.151.728.517	83,81%
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.986.564.100	1.612.470.550	81,17%
		Program penataan bangunan dan lingkungan	30.104.360.893	28.918.792.940	96,06%
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	503.619.659	494.023.800	98,09%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	5.277.441.200	4.966.656.100	94,11%
9.	Meningkatnya Ketahanan Ketertiban dan keamanan kota	Program Penanggulangan Bencana	1.174.241.670	836.903.547	71,27%
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.211.810.600	2.172.339.850	93,34%
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	816.807.770	751.702.196	92,03%
10.	Meningkatnya Toleransi di kalangan masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	950.821.644	.931.537.445	97,97%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Pendidikan Budaya Politik	3.707.975.664	3.703.660.290	99,88%
		Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.272.968.067	1.268.146.390	99,62%
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	99.575.000	99.275.000	99,70%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	626.347.000	612.320.000	97,76%
11.	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Program Kepegawaian Daerah	4.824.499.671	4.578.180.773	93,15%
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.924.054.670	1.579.438.265	85,13%
12.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sekda)	53.769.877.249	49.632.971.674	92,31%
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sekda)	13.410.478.240	13.142.593.370	98,00%
		Program Perekonomian dan Pembangunan (sekda)	3.117.689.305	2.912.991.750	93,43%
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.927.229.658	15.524.254.736	97,47%
		Program Pendaftaran Penduduk	56.162.000	55.702.000	99,18%
		Program Pencatatan Sipil	96.507.300	96.167.800	99,65%
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	267.567.020	266.406.820	99,57%
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	38.251.600	38.206.600	99,88%
		Program Pembinaan perpustakaan Perpustakaan	13.031.039.969	12.702.407.928	97,48%



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pengelolaan Arsip	197.290.550	196.471.450	99,58%
	Program Perlindungan dan penyelamatan Arsip	15.028.500	15.028.500	100%
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	53.000.000	52.799.000	99.62%
	Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	43.970.300	43.958.550	99.97%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Ptk Barat)	147.965.600	146.763.600	99,18%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ptk Barat)	481.795.300	465.370.299	96,60%
	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Ptk Barat)	143.002.400	140.883.057	98,52%
	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Ptk Barat)	4.720.209.700	4.650.487.475	98,52%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (kecamatan Ptk Timur)	154.155.000	151.263.000	98,15%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (kecamatan Ptk Timur)	832.236.000	751.781.000	90,33%
	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (kecamatan Ptk.Timur)	108.171.649	98.953.400	91.48%
	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kecamatan Ptk Timur)	5.782.086.800	5.374.932.683	92,96%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Ptk Selatan)	2.440.000	2.400.000	98%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ptk Selatan)	405.610.200	390.616.600	96%
	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Ptk Selatan)	303.177.400	290.019.000	96%
	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Ptk Selatan)	5.018.508.200	4.843.325.211	97%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Ptk Utara)	3.035.365.800	3.022.005.800	99,65%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ptk Utara)	681.502.200	680.747.700	99,88%
	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Ptk Utara)	102.400.200	102.179.000	99,98%
	Program Pemberdayaan	2.430.975.200	2.399.911.927	99,93%



SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Ptk Utara)			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Ptk Kota)	177.311.200	174.318.361	98,31%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ptk Kota)	606.3536.900	586.454.492	96,68%
		Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Ptk Kota)	370.138.800	365.374.450	98,71%
		Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Ptk Kota)	5.087.715.900	4.958.452.663	97,45%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Ptk Tenggara)	90.345.400	89.370.200	98,92%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ptk Tenggara)	345.268.500	325.692.500	94,33%
		Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Ptk Tenggara)	169.266.900	165.316.900	97,67%
		Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Ptk Tenggara)	2.700.622.100	2.678.707.439	99,19%
13.	Menigkatnya pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	16.738.927.080	15.281.236.216	91,27%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.553.198.985	3.140.576.202	88,38%
14.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Informasi dan Komunikasi Publik	610.105.872	553.614.892	90,74%
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.837.398.086	2.644.051.449	93,19%
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	371.728.463	364.752.800	98,12%
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	83.718.000	51.616.000	61,65%
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.020.894.700	811.079.400	79,45%
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	995.040.400	971.018.200	97,59%
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sekda)	423.407.200	362.675.786	88,67%
		Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	2.026.194.700	1.683.954.652	83,11%
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.567.969.200	1.949.430.700	75,91%
		Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1.974.809.000	1.451.473.688	73,24%



SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
16.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	314.444.780	302.043.824	96,06%
		Program Penangan Kerawanan Pangan	32.875.300	32.824.300	99,84%
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	88.727.000	87.856.100	99,02%
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	186.100.000	185.402.200	99,63%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (DP3)	683.560.331	669.820.400	97,99%
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	14.050.000	13.970.000	99,43%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.817.458.874	1.556.300.212	85,63%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	884.905.478	877.666.199	99,18%
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1.611.539.330	1.477.608.834	91,69%
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	50.520.100	49.728.000	98,43%
		Program Perizinan Usaha Pertanian	11.000.000	3.800.000	34,55%
		Program Penyuluhan Pertanian	88.155.000	75.131.000	85,23%
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	353.403.300	350.734.050	99,24%
		Program Pemasaran Pariwisata	1.427.405.600	1.402.213.347	98,24%
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	21.184.500	20.124.500	95,42%
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	855.913.500	825.467.800	96,44%
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	11.440.000	10.873.679	95,05%
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2.435.680	2.107.385	99,46%
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	866.966.800	852.813.287	98,37%
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	76.900.180	96.380.073	100%
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	6.650.000	6.120.224	92,03%
		Program Pengembangan UMKM	1.918.602.650	1.876.531.960	97,81%
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	54.734.304	49.411.119	90,27%
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	289.041.048	277.748.547	96,09%
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.941.161.033	2.645.114.810	89,93%
		Program Pengendalian Izin	37.627.000	36.450.476	96,87%



SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		Usaha Industri Kabupaten/Kota			
		Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1.514.860.979	1.345.838.678	88,84%
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	239.749.800	222.143.245	92,66%
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	648.578.700	587.899.814	90,64%
17.	Kesempatan Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	39.404.100	11.460.000	29,08%
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	649.808.400	625.967.060	96,33%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	279.955.000	257.300.000	91,91%
		Program Hubungan Industrial	728.087.000	678.069.400	93,13%
18.	Menurunnya Kemiskinan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.714.000	1.640.000	95,68%
		Program Rehabilitas Sosial	1.255.940.540	1.187.824.140	94,58%
		Program Adminstrasi Pemerintahan Desa	160.008.200	157.577.200	98,48%
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakatan Hukum Adat	1.556.249.750	1.506.528.240	96,81%
		Program Pemberdayaan Sosial	1.844.386.800	1.610.876.366	87,34%
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.946.694.300	2.634.095.314	89,39%
		Program Penangan Bencana	335.290.200	291.210.191	86,85%
19.	Meningkatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	848.968.000	841.247.750	99,09%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.274.158.100	4.779.668.491	76,18%
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	281.138.600	276.420.000	98,32%
		Program Promosi Penanaman Modal	35.560.000	30.499.950	85,77%
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	53.000.000	52.799.000	99,62%

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2025 merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 Angka 11 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, mengingat sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pemberian tugas pembantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum di Kota Pontianak.

Secara yuridis, pelaksanaan tugas pembantuan ini bersandar pada hierarki regulasi yang kuat, mulai dari :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Khusus untuk pelaksanaan di Kota Pontianak pada tahun 2025, hal ini juga didasarkan pada penugasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar.

Implementasi tugas pembantuan tahun 2025 di Dinas Pangan, Pertanian dan



Perikanan Kota Pontianak difokuskan pada dua pilar utama, yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas melalui fasilitasi pupuk dan pestisida, serta Program Dukungan Manajemen yang mencakup dukungan manajemen dan teknis lainnya dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan ini dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah, di mana dana tersebut merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran (RKA) K/L terkait. Pengaturan dana ini bertujuan untuk menjamin tersedianya dukungan bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah agar tepat sasaran dalam mendukung produktivitas petani lokal.

Penyelenggaraan asas desentralisasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi yang jelas terhadap pengaturan pendanaan, di mana urusan yang telah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Oleh karena itu, implementasi tugas pembantuan di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak senantiasa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Sebagai bentuk akuntabilitas, terdapat kewajiban bagi pemerintah kota untuk melaporkan seluruh tahapan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang memberi tugas, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Jenderal PSP, demi menjamin transparansi pengelolaan anggaran pembangunan pertanian.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Pontianak

Sektor pertanian memegang peranan vital dalam perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini didasari oleh besarnya potensi sumber daya alam Indonesia sebagai wilayah tropis yang subur, sehingga sektor ini menjadi penyedia kebutuhan pangan primer masyarakat yang ketersediaannya harus terus terjamin guna menghindari ketergantungan pada impor. Keterkaitan antara petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen menciptakan hubungan saling ketergantungan yang kuat dalam



menjaga stabilitas serta pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian nasional, Kota Pontianak memiliki profil wilayah yang unik sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dengan luas wilayah mencapai 107,82 km², kota ini secara administratif terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan, di mana Kecamatan Pontianak Utara menjadi wilayah terluas dengan porsi mencapai 34,52 persen. Secara topografi, wilayah ini berada pada ketinggian yang sangat rendah, berkisar antara 0,10 hingga 1,50 meter di atas permukaan laut.

Kondisi geografis tersebut memberikan karakteristik lahan pertanian yang sangat spesifik bagi Kota Pontianak, di mana lebih dari separuh luas lahan pertaniannya atau sekitar 51,86 persen merupakan lahan gambut. Luasan lahan gambut yang mencapai 5.592 hektar ini memerlukan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi produktivitas daerah. Karakteristik lahan yang menantang ini menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan budidaya tanaman di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya ini.

Dalam dinamikanya, sektor pertanian di Kota Pontianak mengalami transformasi akibat besarnya tekanan alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman, yang berdampak pada tren penurunan produksi tanaman pangan khususnya padi. Tantangan lainnya muncul dari status kepemilikan lahan, di mana hampir 90 persen petani tanaman pangan adalah petani penggarap, bukan pemilik lahan utama. Penurunan ini terlihat nyata dalam data produksi padi tahun 2020 hingga 2024, di mana angka produksi mengalami penyusutan bertahap dari 713,2 ton menjadi hanya 341,5 ton.

Sebagai respons adaptif terhadap kondisi lahan dan pasar perkotaan, aktivitas pertanian di Pontianak kini didominasi oleh komoditas hortikultura, tanaman biofarmaka berupa lidah buaya, serta tanaman buah seperti pepaya. Sayuran daun seperti sawi, kangkung, dan bayam menunjukkan angka produksi yang sangat masif dan menjadi tumpuan ekonomi bagi para petani di lahan terbatas. Khusus untuk lidah buaya, komoditas ini tetap menjadi unggulan daerah dengan volume produksi yang mencapai jutaan kilogram setiap tahunnya, memperkuat posisi strategis Kota Pontianak dalam penyediaan produk biofarmaka.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas pembantuan pada tahun anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung keberlanjutan produktivitas komoditas unggulan tersebut melalui penguatan prasarana dan sarana pertanian. Fokus utama kegiatan ini meliputi pembinaan administrasi di tingkat kabupaten/kota guna menjamin tata kelola program yang akuntabel. Selain itu, dilaksanakan pula pendampingan pupuk secara intensif bagi petani di Kota Pontianak untuk mengatasi kendala kesuburan pada lahan gambut, sehingga tercipta sistem produksi pangan yang efisien, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Pontianak memperoleh alokasi dana yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yaitu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan :

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kota Pontianak Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Wali Kota Pontianak.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pontianak tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga tidak ada capaian kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kota Pontianak.

a. Target Kinerja

Nihil (tidak mendapat dana untuk Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN).

b. Realisasi

Nihil (tidak mendapat dana untuk Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN).

3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kota Pontianak Tugas Pembantuan dari Provinsi Kalimantan Barat yang ditugaskan kepada Kota Pontianak

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Pontianak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pembantuan ini diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sedangkan penyelenggaraannya dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Adapun tugas pembantuan tersebut berkaitan dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas melalui fasilitasi pupuk dan pestisida, serta Program Dukungan Manajemen yang mencakup dukungan manajemen dan teknis lainnya dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

a. Target Kinerja

Target Kinerja mencakup sasaran fisik dan alokasi pagu anggaran yang direncanakan untuk mendukung produktivitas pertanian melalui Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).

- Total Pagu Anggaran : Keseluruhan Pagu Anggaran untuk Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar Rp. 89.810.000,00.
- Target Program Fasilitasi Pupuk dan Pestisida : dianggarkan sebesar Rp. 71.730.000,00. Target Fisik utama adalah Layanan Publik bagi 163.369 penerima pupuk bersubsidi yang divalidasi.
- Komponen Kegiatan Teknis : Target mencakup pendataan, verifikasi, dan validasi penerima pupuk, serta pemantauan peredaran pestisida di tingkat kios dan kelompok tani.
- Target Koordinasi : direncanakan 20 Kali Koordinasi Tingkat Provinsi dan 3 Kali Koordinasi ke Tingkat Pusat terkait Pelayanan pupuk.

b. Realisasi

Realisasi mencakup pencapaian fisik dan serapan anggaran hingga akhir tahun anggaran.

- Total Realisasi Keuangan : secara kumulatif, realisasi keuangan mencapai Rp. 88.461.161,00. Dari total pagu yang tersedia.
- Capaian Program Fasilitasi Pupuk : Realisasi Keuangan sebesar Rp. 70.381.161,00 atau setara dengan 98,11 %. Yang terdiri dari :



- Kegiatan Koordinasi Provinsi terealisasi 100 % (20 OH).
- Kegiatan Koordinasi Pusat terealisasi 66,67 % (2 OP).
- Monitoring dan Pembinaan Peredaran Pupuk serta Pestisida terealisasi 100 % (27 OH dan 30 OH).
- Capaian Program Dukungan Manajemen : Realisasi Keuangan mencapai 100 % yaitu sebesar Rp. 18.080.000,00.
- Honorarium staf pengelola, bendahara pembantu, dan PPK terealisasi penuh selama 12 bulan (12 OB).
- Belanja Bahan (ATK, Komputer, dan Konsumsi Rapat) serta perjalanan dinas koordinasi Provinsi terealisasi 100 %.
- Sisa Anggaran : Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.348.839,00 yang berasal dari efisiensi kegiatan koordinasi dan administrasi



Tabel 3.1. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang di Laksanakan Kota Pontianak

NO	INSTANSI PEMBERI	SKPD/KODE SATKER	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / OUPUT / SUBOUPUT/ KOMPONEN / SUBKOMIAKUN/DETIL	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN				BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 2025					SISA ANGGARAN (10-13)	PERMA- SALAHAN (*)	SOLUSI/ TINDAK LANJUT (		
					KINERJA		HARGA SATUAN	ANGGARAN	FISIK		REALISASI KEUANGAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA REALISASI KEUANGAN (%)						
					VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		FISIK	KEUANGAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Ditjen PSP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	139134	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat				89,810,000	0	0	0	0	0	0				
			018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				71,730,000	0	0	0	0	0	0	0			
			3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida				71,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3993.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	163,369.0	Orang, Akta, Keping, Bidang		71,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Lokasi : KALIMANTAN BARAT														
			3993.QAA.001	Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi	163,369.0	Orang		41,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			051	Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi				12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			J	Kota Pontianak				12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			521211	Belanja Bahan				3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				(KPPN.042-Pontianak)														
				- ATK/Fotocopy/Komputer Supplies	5	PKT	130,000	650,000	5	PKT	130,000	650,000	0	0				
				- Dukungan Pulsa Tim Pendataan, Entry, dan Updating data sistem alokasi pupuk bersubsidi	24	OB	105,000	2,520,000	24	OB	105,000	2,520,000	0	0				
				- Dukungan Pulsa Tim Admin Kabupaten	6	OB	105,000	630,000	6	OB	105,000	630,000	0	0				
			521213	Belanja Honor Output Kegiatan				7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				(KPPN.042-Pontianak)														
				- Honor Admin Kabupaten/Kota	6	OB	250,000	1,500,000	6	OB	250,000	1,500,000	0	0				
				- Honor Tim Pendataan, Entry, dan Updating data sistem alokasi pupuk bersubsidi	24	OB	250,000	6,000,000	24	OB	250,000	6,000,000	0	0				
			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				(KPPN.042-Pontianak)														
				- Pengawasan/monitoring/pendataan/penginputan/updating data calon petani penerima subsidi pupuk	10	OH	150,000	1,500,000	10	OH	150,000	1,500,000	0	0				
			052	Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi				28,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0		



NO	INSTANSI PEMBERI	SKPD/KODE SATKER	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / OUPUT / SUBOUPUT/ KOMPONEN / SUBKOM/AKUN/DETIL	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN				BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 2025						SISA ANGGARAN (10-13)	PERMA- SALAHAN (*)	SOLUSI/ TINDAK LANJUT (*)
					KINERJA		HARGA SATUAN	ANGGARAN	FISIK		REALISASI KEUANGAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA REALISASI KEUANGAN (%)					
					VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		FISIK	KEUANGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			J	Kota Pontianak				28,930,000	0	0	0	0	0	0			
			521211	Belanja Bahan				28,930,000	0	0	0	0	0	0			
				(KPPN.042-Pontianak)				6,930,000									
				Dukungan Pulsa Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan/Tim Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani	66	OB	105,000	6,930,000	66	OB	105,000	6,930,000	0	0			
			521213	Belanja Honor Output Kegiatan				22,000,000	0	0	0	0	0	0			
				(KPPN.042-Pontianak)													
				- Honor Tim Pembina Kabupaten	22	OB	250,000	5,500,000	22	OB	250,000	5,500,000	0	0			
				Honor Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan/Tim Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	66	OB	250,000	16,500,000	66	OB	250,000	16,500,000	0	0			
			3993.QAA.00 2	Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	1.0	laporan		30,000,000	0	0	0	0	0				
			051	Persiapan, Monev, dan Pelaporan				21,450,000	0	0	0	0	0				
			J	Kota Pontianak				21,450,000	0	0	0	0	0				
			521211	Belanja Bahan				1,150,000	0	0	0	0	0	0			
				(KPPN.042-Pontianak)													
				- Penjilidan dan Penggandaan Laporan	2	PKT	575,000	1,150,000	2	PKT	575,000	1,150,000	0	0			
			522191	Belanja Jasa Lainnya				800,000	0	0	0	0	0	0			
				(KPPN.042-Pontianak)													
				- Pengiriman Laporan	8	PKT	100,000	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	Dibintang	
			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				19,500,000	0	0	0	0	0	0			
				(KPPN.042-Pontianak)													
				- Koordinasi/Konsultasi/ menghadiri undangan ke Provinsi	20	OH	150,000	3,000,000	20	OH	150,000	3,000,000	0	0			
				- Koordinasi/Konsultasi/ menghadiri undangan ke Pusat	3	OP	5,500,000	16,500,000	2	OP		15,951,161	0	548,839			
			052	Pelaksanaan Kegiatan				8,550,000	0	0	0	0	0	0	0		
			J	Kota Pontianak				8,550,000	0	0	0	0	0	0	0		
			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				8,550,000	0	0	0	0	0	0	0		
				(KPPN.042-Pontianak)													
				- Monitoring dan Pembinaan Peredaran Pupuk dan Pestisida	27	OH	150,000	4,050,000	27	OH	150,000	4,050,000	0	0			
				Identifikasi Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida di kios dan di tingkat Kelompok Tani (Petani)	30	OH	150,000	4,500,000	30	OH	150,000	4,500,000	0	0			
			018.08.WA	Program Dukungan Manajemen							18,080,000	0	0	0	0	0	0



NO	INSTANSI PEMBERI	SKPD/KODE SATKER	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / OUPUT / SUBOUPUT/ KOMPONEN / SUBKOM/AKUN/DETIL	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN				BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 2025					SISA ANGGARAN (10-13)	PERMA- SALAHAN (*)	SOLUSI/ TINDAK LANJUT (*)		
					KINERJA		HARGA SATUAN	ANGGARAN	FISIK		REALISASI KEUANGAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA REALISASI KEUANGAN (%)						
					VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		FISIK	KEUANGAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian				18,080,000	0	0	0	0	0	0				
			1797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0	Dokumen,		18,080,000	0	0	0	0	0	0	0			
				Lokasi : KALIMANTAN BARAT														
			1797.EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0	Dokumen		18,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			051	Layanan Manajemen Keuangan				18,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			J	Kota Pontianak				18,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				11,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				(KPPN.042-Pontianak)														
				Honorarium Staf Pengelola - (pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta)	12	OB	175,000	2,100,000	12	OB	175,000	2,100,000	0	0	0	0		
				Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta)	12	OB	190,000	2,280,000	12	OB	190,000	2,280,000	0	0	0	0		
				Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta)	12	OB	600,000	7,200,000	12	OB	600,000	7,200,000	0	0	0	0		
			521211	Belanja Bahan				5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				(KPPN.042-Pontianak)														
				- ATK dan Bahan Komputer	1	TAHUN	3,000,000	3,000,000	1	TAHUN	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0		
				- Konsumsi Rapat	40	OK	50,000	2,000,000	40	OK	50,000	2,000,000	0	0	0	0		
			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				(KPPN.042-Pontianak)														
				- Perjalanan dalam rangka koordinasi tingkat provinsi	10	OP	150,000	1,500,000	10	OP	150,000	1,500,000	0	0	0	0		
			JUMLAH								89,810,000			88,461,161		1,348,839		

Sumber : Bappeda Kota Pontianak



c. Permasalahan dan Kendala

Meskipun realisasi anggaran secara umum sangat tinggi, terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang menghambat penyerapan dana secara sempurna :

1. Sisa anggaran yang tidak terserap : terdapat sisa anggaran sebesar Rp, 1.348.839,00 yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
2. Kendala utama serapan tersebut berasal dari anggaran belanja pengiriman laporan yang statusnya “dibintang” atau diblokir sehingga tidak dapat digunakan.
3. Sisa dana juga berasal dari Belanja Perjalanan Biasa untuk Kegiatan Koordinasi, Konsultasi atau Menghadiri Undangan Ke Pemerintah Pusat yang tidak terlaksana sepenuhnya.
4. Realisasi Koordinasi ke tingkat pusat hanya mencapai 66.67 % (terlaksana 2 kali dari target 3 kali) yang berkontribusi pada sisa pagu anggaran perjalanan dinas.

d. Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai solusi atas kendala tersebut dan Upaya penguatan program dimasa mendatang, langkah-langkah strategis yang perlu diambil adalah :

1. Pemerintah Daerah harus menjaga komitmen penuh dalam menjamin ketersediaan dan akses pupuk guna meningkatkan produktivitas panen serta kesejahteraan petani di Kota Pontianak.
2. Untuk tahun berikutnya, perlu dilakukan Koordinasi lebih awal terkait status dana yang “dibintang” agar alokasi belanja pengiriman laporan dan perjalanan dinas dapat dialihkan atau dibuka blokirnya tepat waktu.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- 2) Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- 3) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- 4) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- 5) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.
- 6) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa meliputi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Pendidikan Dasar.
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan PAUD. Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar di bidang Pendidikan yaitu berdasarkan Harapan Lama Sekolah dan Lama Sekolah dalam kurun waktu 1 tahun.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Mutu keseluruhan, capaian SPM Bidang Pendidikan menunjukkan tren peningkatan positif di seluruh indikator Angka Partisipasi Sekolah. Pendidikan dasar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sementara PAUD dan pendidikan kesetaraan masih memerlukan penguatan kebijakan, perluasan akses, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar capaian SPM dapat meningkat menuju kategori yang lebih tinggi. Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			APS Tahun 2025	APS Tahun 2024	Selisi h	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA				82.55 %
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					68.69 %
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun)	%	73.58	70.54	3.04	95.87 %
2 .	Pendidikan Dasar					96.93 %
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun) SD	%	98.01	97.66	0.35	99.64 %
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15	%	96.85	96.29	0.56	99.42 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			APS Tahun 2025	APS Tahun 2024	Selisi h	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Tahun) SMP					
3.	Pendidikan Kesetaraan					82.03 %
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	%	21.65	17.55	4.10	81.06 %

Tabel diatas menyajikan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dengan indikator utama Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada berbagai jenjang pendidikan. Secara umum, Indeks Pencapaian SPM berada pada kategori *Tuntas Madya* dengan nilai 82,55%, yang menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan telah terpenuhi dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada beberapa aspek.

a. Pendidikan Dasar Usia Dini (PAUD)

- 1) APS Usia 5–6 Tahun pada tahun 2025 mencapai 73,58%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 70,54%.
- 2) Terdapat kenaikan 3,04%, menandakan perbaikan akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini.
- 3) Total capaian indikator berada pada 95,87%, yang menunjukkan kinerja sangat baik meskipun tingkat partisipasi belum sepenuhnya merata.

Upaya perluasan akses PAUD menunjukkan hasil positif, namun masih diperlukan penguatan sosialisasi dan ketersediaan layanan PAUD agar partisipasi semakin meningkat.

b. Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

- 1) APS Usia 7–12 Tahun (SD):
 - Tahun 2025: 98,01%
 - Tahun 2024: 97,66%
 - Kenaikan: 0,35%
 - Total capaian: 99,64%
- 2) APS Usia 13–15 Tahun (SMP):
 - Tahun 2025: 96,85%
 - Tahun 2024: 96,29%

- Kenaikan: 0,56%
- Total capaian: 99,42%

Pendidikan dasar menunjukkan kinerja sangat optimal, dengan hampir seluruh anak usia sekolah telah terlayani. Hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan wajib belajar dan ketersediaan sarana-prasarana pendidikan dasar.

c. Pendidikan Kesetaraan

- APS Usia 7–18 Tahun Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2025 sebesar 21,65%, meningkat dari 17,55% pada tahun 2024.
- Terjadi kenaikan signifikan sebesar 4,10%.
- Total capaian indikator mencapai 81,06%.

Walaupun masih relatif rendah dibandingkan pendidikan formal, peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh jalur pendidikan formal, seperti melalui Paket A, B, dan C.

Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.2

Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.	PENDIDIKAN DASAR USIA DINI					68.69 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					49.99 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	23747	14839	8908	62.49 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					93.51 %
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	67.52	67.11	0.4	99.39 %
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	78.67	68.94	9,73	87.63 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.	PENDIDIKAN DASAR					96.93 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					77.47 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	105796	102445	3351	96.83 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					19.47 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					97.33 %
	SD (2025)					96.86 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	66.08	63.58	2,5	96.22 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	55.22	52.32	2,9	94.75 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.82	74.92	0.9	98.81 %
	4 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	75.91	74.91	1	98.68 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.13	57.63	2,5	95.84 %
	SMP (2025)					97.80 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	78.5	77.4	1,1	98.60 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	67.17	65.67	1,5	97.77 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.83	71.33	1,5	97.94 %
	4 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	72.89	71.89	1	98.63 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.34	58.94	2,4	96.09 %
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN					82.03 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					65.82 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	3351	2757	594	82.27 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					16.21 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					81.06 %
	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	21.65	17.55	4,1	81.06 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan cenderung meningkat. Dari hasil pengukuran terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan, capaian SPM Pendidikan berada pada kisaran 82,03%–96,93%, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memastikan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Pada Pendidikan Dasar, capaian SPM mencapai 96,93%, didukung oleh

tingkat keterlayanan peserta didik sebesar 96,83% dari total sasaran layanan. Hampir seluruh anak usia SD dan SMP telah memperoleh layanan pendidikan formal. Dari sisi mutu, baik jenjang SD maupun SMP menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari capaian indikator literasi, numerasi, serta indeks iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas yang berada di atas 94%. Hal ini menegaskan bahwa layanan pendidikan dasar tidak hanya menjangkau hampir seluruh sasaran, tetapi juga diselenggarakan dengan kualitas yang memadai.

Capaian Pendidikan Dasar Usia Dini (PAUD) tercatat sebesar 68,69%, yang dipengaruhi oleh masih terbatasnya jumlah anak usia layanan yang terlayani, yaitu 62,49% dari total sasaran. Meskipun demikian, mutu layanan PAUD menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian 93,51%, didukung oleh meningkatnya proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B serta peningkatan signifikan jumlah guru PAUD berkualifikasi Sarjana (S1/D-IV). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama PAUD terletak pada perluasan cakupan layanan, bukan pada kualitas penyelenggaraan.

Sementara itu, Pendidikan Kesetaraan mencapai capaian SPM sebesar 82,03%, dengan tingkat keterlayanan peserta didik 82,27% dan capaian mutu layanan 81,06%. Angka Partisipasi Sekolah pendidikan kesetaraan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi sosialisasi dan kebijakan afirmatif agar pendidikan kesetaraan dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh jalur pendidikan formal.

4.1.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Alokasi anggaran dan realisasi dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada Dinas Pendidikan bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Anggaran Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2025 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :



Tabel 4.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Urusan Pendidikan
Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		15,025,021,100	13,664,781,468	90.95 %
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412		5,901,355,200	5,664,185,318	95.98 %
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0.00 %
	2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	0	0	0.00 %
	3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	0	0	0.00 %
	4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0.00 %
	5. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0.00 %
	6. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0.00 %
	7. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0.00 %
	Kekhususan PAUD				
	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0.00 %
	2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	3,279,427,900	3,202,967,092	97.67 %
	3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	285,605,000	284,483,000	99.61 %
	4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	2,336,322,300	2,176,735,226	93.17 %
	5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	7. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0.00 %
	8. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0.00 %
	9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629		5,684,268,600	5,082,261,674	89.41 %
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0.00 %
	2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	576,349,600	436,569,800	75.75 %
	3. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	301,967,400	299,026,500	99.03 %
	4. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0.00 %
	5. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0.00 %
	6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0.00 %
	Literasi				
	1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1,208,523,000	1,092,987,385	90.44 %
	2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0.00 %
	3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	594,955,200	591,979,700	99.50 %
	4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	7. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0.00 %
	8. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00 %
	9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	10. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1,793,950,400	1,568,710,904	87.44 %
	Numerasi				



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
	2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
	3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	5. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0.00 %
	6. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0.00 %
	7. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00 %
	8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1,208,523,000	1,092,987,385	90.44 %
	9. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
Keamanan					
	1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0.00 %
	4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0.00 %
Kebhinekaan					
	1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0.00 %
	4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0.00 %
	Inklusifitas				
	1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0.00 %
	4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0.00 %
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647		3,439,397,300	2,918,334,476	84.85 %
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0.00 %
	2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0.00 %
	3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	0	0	0.00 %
	4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0.00 %
	5. Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0.00 %
	6. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0.00 %
	Literasi				
	1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0.00 %
	2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	322,312,700	319,612,200	99.16 %
	4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	7. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0.00 %
	8. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	614,681,200	442,410,682	71.97 %
	9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	10. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00 %
Numerasi					
	1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
	2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
	3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0.00 %
	5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	6. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	614,681,200	442,410,682	71.97 %
	7. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00 %
	8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	917,301,100	838,124,100	91.37 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	9. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
Keamanan					
	1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	323,473,700	291,925,604	90.25 %
	4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	0	0	0.00 %
Kebhinekaan					
	1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	323,473,700	291,925,604	90.25 %
	4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0.00 %
Inklusifitas					
	1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %
	2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	323,473,700	291,925,604	90.25 %
	4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0.00 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
4	Pendidikan Kesenjangan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20250805052437		0	0	0.00 %
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	0	0	0.00 %
	2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	0	0	0.00 %
5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842		0	0	0.00 %
	Literasi				
	1. Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	0	0	0.00 %
	Numerasi				
	2. Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	0	0	0.00 %

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025

4.1.4 Dukungan Personil

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Pontianak didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2025.

Tabel 4.4
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan

No	Gol/Pendidikan	SMP	SMA	D I s/d D III	D IV/S1	S2	S3	Jumlah
1	PPPK	-	248	23	1.277	-	-	1.548
2	Gol I	-	-	-	-	-	-	-
3	GOL II	1	21	24	1	-	-	47

4	GOL III	-	17	19	985	73	2	1.096
5	GOL IV	-	6	46	215	45	-	312
Jumlah		1	266	110	2.465	118	2	2.962

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Adapun permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan antara lain:

- Belum optimalnya kemampuan dan pemahaman pelaksana teknis dalam menganalisis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan belum mengacu pada perencanaan berbasis data dengan menganalisis rapor pendidikan;
- Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam keseluruhan tahapan penerapan dan pemenuhan SPM di Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik dalam hal capaian indikator layanan SPM maupun anggaran yang mendukung kegiatan dan sub kegiatan SPM.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan di Kota Pontianak yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak melaksanakan rincian jenis pelayanan dan rumus pencapaian spm kesehatan yang terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga Kesehatan.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					77.64 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					60.51 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	11523	8716	2807	75.64 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					17.13 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					85.65 %
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	11523	8716	2807	75.64 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2084580	1568880	515700	75.26 %
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	11523	8716	2807	75.64 %
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	11523	8716	2807	75.64 %
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	11523	8716	2807	75.64 %
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	11523	8716	2807	75.64 %
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	11523	8716	2807	75.64 %
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	11523	8716	2807	75.64 %
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	11523	8716	2807	75.64 %
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
	11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	772	772	0	100.00 %
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	693	693	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	665	665	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2447	2447	0	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	634	634	0	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	130	130	0	100.00 %
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	11523	8716	2807	75.64 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					82.54 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					63.89 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	11523	9202	2321	79.86 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					18.66 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					93.29 %
	1. Formulir partograf	Formulir	11523	9202	2321	79.86 %
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	11523	9202	2321	79.86 %
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	11523	9202	2321	79.86 %
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	693	693	0	100.00 %
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	665	665	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2447	2447	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	634	634	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	130	130	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					84.98 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					66.44 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	10881	9036	1845	83.04 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					18.55 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					92.73 %
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	10881	9036	1845	83.04 %
	2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	10881	9036	1845	83.04 %
	3. Salep/tetes mata antibiotic (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	10881	9036	1845	83.04 %
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	10881	9036	1845	83.04 %
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	10881	9036	1845	83.04 %
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10881	9036	1845	83.04 %
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	23	23	0	100.00 %
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	693	693	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	665	665	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2447	2447	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	634	634	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	138	138	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %
	14. Kader Kesehatan	Orang	1761	1761	0	100.00 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					68.30 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					53.88 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	43316	29172	14144	67.35 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					14.42 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					72.12 %
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	43316	29172	14144	67.35 %
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	43316	29172	14144	67.35 %
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	43316	29172	14144	67.35 %
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	5151	4073	1078	79.07 %
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	43316	21561	21755	49.78 %
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	10303	5151	5152	50.00 %
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	10303	5151	5152	50.00 %
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	10303	5151	5152	50.00 %
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	10303	5151	5152	50.00 %
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	10303	5151	5152	50.00 %
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	43316	5151	38165	11.89 %
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	43316	29172	14144	67.35 %
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	53619	29172	24447	54.41 %
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	23	23	0	100.00 %
	15. Formula terapi gizi buruk	Paket	50	50	0	100.00 %
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	693	693	0	100.00 %
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	665	665	0	100.00 %
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2447	2447	0	100.00 %
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %
	20. Guru PAUD	Orang	684	684	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	21. Kader kesehatan	Orang	1761	1761	0	100.00 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					99.68 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					79.70 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	98842	98475	367	99.63 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					19.98 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					99.90 %
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	98842	98475	367	99.63 %
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	98842	98475	367	99.63 %
	3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	98842	98475	367	99.63 %
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	98842	98475	367	99.63 %
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	98842	98475	367	99.63 %
	6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	32447	32447	0	100.00 %
	7. Alat pemeriksaan HB (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	23	23	0	100.00 %
	8. Strip HB sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di	Strip	5889	5889	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)					
9.	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	23	23	0	100.00 %
10.	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	10922	10922	0	100.00 %
11.	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	693	693	0	100.00 %
12.	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	665	665	0	100.00 %
13.	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2447	2447	0	100.00 %
14.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	634	634	0	100.00 %
16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	138	138	0	100.00 %
17.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	3826	3826	0	100.00 %
18.	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	1761	1761	0	100.00 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					60.87 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					42.71 %
A.	Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	445199	237708	207491	53.39 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					18.15 %
B.	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					90.77 %
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
2.	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	23	23	0	100.00 %
3.	Alat : Tensimeter	Unit	23	23	0	100.00 %
4.	Alat : Glukometer	Unit	23	23	0	100.00 %
5.	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	23	23	0	100.00 %
6.	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	90100	237708	-147608	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	23	23	0	100.00 %
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	445199	90100	355099	20.24 %
	9. Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	23	1	22	4.35 %
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	23	23	0	100.00 %
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	6589	6589	0	100.00 %
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	4656	4656	0	100.00 %
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	1920	1920	0	100.00 %
	c. Vasektomi set	Unit	13	13	0	100.00 %
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	23	23	0	100.00 %
	13. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/ Vial	10922	10922	0	100.00 %
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	726	726	0	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	544	544	0	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1969	1969	0	100.00 %
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	86	86	0	100.00 %
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	189	189	0	100.00 %
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	46	46	0	100.00 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					89.85 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					70.76 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	76464	67631	8833	88.45 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					19.10 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					95.48 %
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	23	23	0	100.00 %
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	76646	67631	9015	88.24 %
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	76646	67631	9015	88.24 %
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	76646	67631	9015	88.24 %
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari	Paket	76646	67631	9015	88.24 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	(AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)					
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	76646	67631	9015	88.24 %
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	23	0	100.00 %
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	693	693	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	665	665	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2447	2447	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	130	130	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	138	138	0	100.00 %
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1761	1761	0	100.00 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					87.32 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					67.32 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	51141	43035	8106	84.15 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	23	23	0	100.00 %
	2. Obat Hipertensi	Paket	23	23	0	100.00 %
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	23	23	0	100.00 %
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	23	23	0	100.00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	23	23	0	100.00 %
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	726	726	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	544	544	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1969	1969	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	86	86	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	31	31	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	35	35	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	189	189	0	100.00 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					77.62 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					57.62 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	17221	12403	4818	72.02 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	23	23	0	100.00 %
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	23	23	0	100.00 %
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	12403	12403	0	100.00 %
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	23	23	0	100.00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	23	23	0	100.00 %
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	726	726	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	544	544	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1969	1969	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	35	35	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	189	189	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	86	86	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	49	49	0	100.00 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					98.70 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat	Orang	1.441	1254	- 1.252.559	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					18.70 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					93.52 %
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	23	23	0	100.00 %
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	12	5	7	41.67 %
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	4	4	0	100.00 %
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	4	4	0	100.00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	1	1	0	100.00 %
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	23	29	-6	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	23	30	-7	100.00 %
	8. Tenaga profesional lainnya	Orang	23	23	0	100.00 %
	9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	23	23	0	100.00 %
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	11996	13324	-1328	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10000	10000	0	100.00 %
	2. Reagen Zn TB	Kit	555	555	0	100.00 %
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	2221	2221	0	100.00 %
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	23992	23992	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	5. Katrid tes cepat molekuler	Tes	11996	11996	0	100.00 %
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	2221	2221	0	100.00 %
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	8. Tuberkulin	Vial	200	200	0	100.00 %
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	37	37	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	37	37	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	37	37	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	37	37	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	37	37	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	37	37	0	100.00 %
	15. Kader Kesehatan	Orang	46	46	0	100.00 %
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Layanan Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani Terhadap : Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	15986	17248	-1262	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	41	41	0	100.00 %
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	15986	17248	-1262	100.00 %
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	15986	17248	-1262	100.00 %
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	15986	17248	-1262	100.00 %
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	41	41	0	100.00 %
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	41	41	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	41	41	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	41	41	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	41	41	0	100.00 %
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	41	41	0	100.00 %

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2024

4.2.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 dengan Target Anggaran sebesar Rp. 4.680.341.016,- dan capaian realisasi sebesar Rp. 4.368.346.407,- serta capaian penyerapan anggaran sebesar 93.33% adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Urusan Kesehatan
Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		4,680,341,016	4,368,346,407	93.33 %
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237		4,680,341,016	4,368,346,407	93.33 %
	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	553,062,600	478,101,909	86.45 %
	2. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	257,227,000	221,296,413	86.03 %
	3. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	402,849,000	373,919,123	92.82 %
	4. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	69,228,000	68,465,646	98.90 %
	5. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	23,430,300	23,136,480	98.75 %
	6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	323,145,016	282,928,913	87.55 %
	7. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	30,734,400	28,940,000	94.16 %
	8. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	133,755,800	133,692,330	99.95 %
	9. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	277,070,000	276,924,440	99.95 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	10. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	10,883,400	7,160,160	65.79 %
	11. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	2,139,589,000	2,027,461,878	94.76 %
	12. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	459,366,500	446,319,115	97.16 %

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2024

4.2.3 Dukungan Personil

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Pontianak didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025.

Tabel 4.7

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan

No	Gol/Pendidikan	SMA/sederajat	D I s/d D III	D IV/S1	S2	S3	Jumlah
1	PPPK	5	49	91	-	-	145
2	Gol I	-	-	-	-	-	-
3	GOL II	11	118	-	-	-	129
4	GOL III	14	315	226	13	-	568
5	GOL IV	-	-	23	9	-	32
Jumlah		30	482	338	22	-	872

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2024

4.2.4 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Kesehatan antara lain :

1. Realisasi anggaran tidak terserap 100 persen dikarenakan ada perubahan biaya kegiatan
2. Pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dengan baik terutama pada RS Swasta, Praktek dokter mandiri dan klinik swasta lainnya karena memiliki sistem informasi sendiri sehingga data masih terpilah-pilah, belum ada sistem pengumpulan data yang dapat digunakan bersama program lain

3. ketidakmampuan lansia dalam mengakses faskes, kurangnya keterlibatan keluarga dalam membantu lansia untuk mengakses layanan kesehatan di faskes, aturan posyandu yang tidak mengizinkan melakukan pengobatan diposyandu sehingga kunjungan menurun
4. ukungan dan kerja sama dari lintas program dan lintas sektor masih belum optimal. Misalnya pada kunjungan PTM ke institusi baik negeri dan swasta tetapi antusias peserta masih rendah
5. kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa anaknya menimbang minimal 8 x, capaian imunisasi IDL yang dibawah target
6. Petugas belum optimal dalam menginput data di aplikasi SIGIZI KESGA sehingga ada perbedaan data yang cukup signifikan antara laporan manual dan aplikasi, Faskes jejaring (RS, Klinik, PMB) tidak lengkap dalam mengisi data (misalnya NIK, alamat, hasil pemeriksaan, dll.) sehingga tidak dapat di validasi oleh Puskesmas
7. adanya perubahan indikator untuk standar minimal pelayanan yang awalnya menggunakan capaian K4 menjadi K6 sehingga adanya ibu hamil yang belum sampai kunjungan K6 sudah melahirkan sehingga K6 tidak tercapai, data dari PMB dan Rumah sakit tidak lengkap sehingga tidak dapat divalidasi. RS, Klinik dan PMB tidak melaksanakan ANC sesuai standar 12T (pemeriksaan lab. Terutama triple eliminasi, skrining jiwa, USG oleh dokter), Adanya perubahan DO SPM ibu hamil sesuai standar dari K4 menjadi K6

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kota Pontianak dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan kinerja yang baik, khususnya pada indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum dan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara umum, capaian layanan dasar telah menjangkau sebagian besar sasaran, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terlayani secara optimal, terutama pada aspek kualitas layanan tertentu.

Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8

Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/ terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					92.83 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	690.277	635.036	55.241	92.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan Dasar (20%)					19.23 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					96.16 %
	JARINGAN PERPIPAAN					96.16 %
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	165.104	158.759	6.345	96.16 %
	Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	165.104	158.759	6.345	96.16 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					96.16 %
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	165.104	158.759	6.345	96.16 %
	Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	165.104	158.759	6.345	96.16 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					88.34 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	690.277	635.036	55.241	92.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan Dasar (20%)					14.74 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					73.72 %
	KUANTITAS SPALD					97.73 %
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	165.104	161.362	3.742	97.73 %
	KUALITAS SPALD					49.71 %
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)					

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah total yang Harus Dilayani	Jumlah total yang Dilayani	Mutu yang belum terlayani/terpenuhi	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	163.497	-	163.497	100.00 %
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)					
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	165.104	2.635	162.469	1.60 %
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	165.104	161.503	3.601	97.82 %

Berdasarkan Tabel 4.8, pada indikator Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, capaian SPM tercatat sebesar 92,83%. Jumlah penduduk yang menjadi sasaran layanan sebanyak 690.277 orang, dengan realisasi layanan mencapai 635.036 orang atau sekitar 92,00%. Dari sisi mutu layanan, capaian mencapai 96,16%, baik pada sistem jaringan perpipaan maupun non-perpipaan. Hal ini tercermin dari terpenuhinya akses air minum layak bagi 158.759 rumah tangga dari total 165.104 rumah tangga sasaran, baik dari aspek kuantitas (ketersediaan minimal 60 liter per orang per hari) maupun kualitas air minum sesuai standar kesehatan.

Sementara itu, pada indikator Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, capaian SPM berada pada angka 88,34%. Dari sisi cakupan layanan, sebanyak 635.036 orang atau 92,00% dari total sasaran telah memperoleh layanan dasar. Namun demikian, capaian mutu layanan masih relatif rendah, yaitu sebesar 73,72%, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya

penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar akses aman, khususnya pada sistem terpusat (SPALD-T) dan sebagian sistem setempat (SPALD-S).

Ditinjau lebih lanjut, capaian kuantitas layanan air limbah domestik telah menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan 97,73% rumah tangga telah memiliki akses minimal satu fasilitas pengolahan air limbah domestik. Namun, dari sisi kualitas, capaian masih bervariasi. Akses layak melalui sistem setempat di wilayah berpenduduk jarang telah mencapai 97,82%, sementara akses aman melalui sistem terpusat dan pengelolaan lumpur tinja secara berkala masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong pembangunan dan penguatan infrastruktur SPALD, peningkatan layanan penyedotan lumpur tinja, serta penguatan peran masyarakat guna mewujudkan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan

4.3.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Adapun anggaran dan realisasi Tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
KOTA PONTIANAK			38,473,914,018,000	36,581,139,196,000	95.08 %
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		33,196,472,818,000	31,650,166,596,000	95.34 %
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638		33,196,472,818,000	31,650,166,596,000	95.34 %
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	2. Supervisi pembangunan/peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	3. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/De tik	13,300,324,261,000	13,166,873,896,000	99.00 %
	4. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	5. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/De tik	16,718,238,357,000	16,008,215,000,000	95.75 %
	6. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/De tik	0	0	0%
	7. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	3,177,910,200,000	2,475,077,700,000	77.88 %
	8. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	9. Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyele nggara SPAM	0	0	0%
	10. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	11. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelomp ok Masyara kat	0	0	0%
	12. Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	13. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	14. Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyele nggara SPAM	0	0	0%
	15. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	16. Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	17. Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	18. Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	19. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	20. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	21. Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	22. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	23. Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
	24. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
	25. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
	26. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
	27. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
	28. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
	29. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
	30. Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	31. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	32. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
	33. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		5,277,441,200,000	4,930,972,600,000	93.43 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559		5,277,441,200,000	4,930,972,600,000	93.43 %
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
	3. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	4. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	5. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	6. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	5,024,825,200,000	4,806,501,600,000	95.66 %
	7. Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	8. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	9. Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	10. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	11. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
	12. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	13. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	14. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	252,616,000,000	124,471,000,000	49.27 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
15.	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
16.	Rehabilitasi/peningkatan/pe- rluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
17.	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/p- eningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokume n	0	0	0%
18.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
19.	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
20.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
21.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
22.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
23.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
24.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
25.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
26.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
27.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
28.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah	M ³ /Hari	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				
29.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
30.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
31.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
32.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
33.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
34.	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
35.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
36.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
37.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
38.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
39.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
40.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
41.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024

4.3.4 Dukungan Personil

Dukungan Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2025.

Tabel 4.10
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

No	Gol/Pendidikan	SMA/ sederajat	D I s/d D III	D IV/S1	S2	S3	Jumlah
1	PPPK	5	3	30	-	-	38
2	Gol I	-	-	-	-	-	-
3	GOL II	9	1	-	-	-	10
4	GOL III	12	5	50	6	-	73
5	GOL IV	-	-	1	7	-	8
Jumlah		26	9	81	13	-	129

4.3.5 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

- Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja pelayanan dasar. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program pemenuhan SPM harus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas pembangunan daerah.
- kondisi infrastruktur eksisting yang sebagian telah mengalami penurunan kualitas juga menjadi tantangan tersendiri. Kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala masih cukup tinggi, sementara peningkatan akses layanan harus tetap dilaksanakan untuk memenuhi target indikator SPM.

- Di sisi lain, ketersediaan data teknis yang akurat dan terintegrasi masih perlu ditingkatkan guna mendukung perencanaan berbasis kinerja serta pelaporan capaian SPM yang lebih akuntabel.
- c. keterbatasan sumber daya manusia teknis dan tenaga pengawas lapangan turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Beban kerja perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta monitoring dan evaluasi capaian layanan dasar memerlukan dukungan kapasitas SDM yang memadai. Koordinasi lintas perangkat daerah juga masih perlu diperkuat, mengingat pemenuhan SPM pekerjaan umum memiliki keterkaitan erat dengan sektor perumahan, penataan ruang, lingkungan hidup, serta kewilayahan.
 - d. dinamika perkembangan wilayah perkotaan dan pertumbuhan permukiman yang pesat memberikan tekanan terhadap kapasitas infrastruktur yang ada, khususnya pada sistem drainase dan jaringan jalan lingkungan. Faktor perilaku masyarakat, seperti pengelolaan sampah yang belum optimal dan pemanfaatan ruang yang kurang tertib, turut mempengaruhi keberlanjutan fungsi layanan dasar yang telah dibangun.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban kabupaten/ kota adalah:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, yang mencakup: 1) pendampingan/ pembinaan; 2) pembimbingan; 3) penyuluhan; 3) pelayanan informasi; dan 5) bantuan teknis.

Bantuan teknis dalam hal ini meliputi:

- 1. pendampingan penggantian kerugian;
- 2. penyusunan rencana tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;



3. pembangunan Rumah Susun Umum;
4. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
5. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:

- 1) Standar Jumlah

Setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

- 2) Kualitas Pelayanan Dasar

Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- b. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi:

- 1) Standar Jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.

- 2) Kualitas Pelayanan Dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi

program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat menunjukkan kinerja yang sangat optimal, dengan seluruh indikator layanan dasar mencapai 100,00%. Capaian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat, khususnya bagi korban bencana dan masyarakat yang terdampak program relokasi pemerintah daerah.

Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Bencana Meliputi :					
	a) Letusan gunung berapi;					
	b) Gempa bumi;					
	c) Tanah longsor;					
	d) Gelombang pasang;					
	e) Banjir bandang; dan/atau					
	f) Bencana lainnya.					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	a. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	343	343	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	b. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	93	93	0	100.00 %
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi :					
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;					
	b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;					
	c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;					
	d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau					
	e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	a. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	14	14	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	b. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	42	42	0	100.00 %
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	14	14	0	100.00 %
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Orang	14	14	0	100.00 %
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi (Penggantian Uang dan Pembangunan Kembali)	Unit Rumah	14	14	0	100.0

Berdasarkan Tabel 4.11, pada indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, seluruh sasaran layanan telah terpenuhi. Dari total 343 orang yang harus dilayani, seluruhnya telah menerima layanan, sehingga tingkat keterlayanan mencapai 100,00%. Layanan yang diberikan berupa rehabilitasi rumah sebanyak 93 unit, sementara bentuk layanan lain seperti pembangunan kembali, pemukiman kembali, dan bantuan rumah sewa layak huni tidak dilaksanakan karena tidak terdapat kebutuhan pada periode pelaporan. Dengan demikian, baik dari aspek penerima layanan maupun mutu layanan, indikator ini telah terpenuhi secara penuh.

Selanjutnya, pada indikator Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, capaian SPM juga mencapai 100,00%. Seluruh 14 orang sasaran relokasi telah mendapatkan layanan sesuai ketentuan. Bentuk fasilitasi meliputi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebanyak 42 unit rumah, pelaksanaan penilaian oleh tim penaksir (appraisal), proses sosialisasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan penggantian untung berupa penggantian uang dan/atau pembangunan kembali rumah, yang seluruhnya terealisasi sesuai rencana aksi.

Secara keseluruhan, rincian capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memenuhi layanan dasar secara menyeluruh, baik dari sisi cakupan penerima layanan maupun mutu layanan. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan melalui penguatan perencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi bencana, serta konsistensi dalam pelaksanaan program relokasi agar penyediaan hunian layak tetap berjalan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi Tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	KOTA PONTIANAK		702,664,160	699,495,046	99.55 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		702,664,160	699,495,046	99.55 %
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340		0	0	0.00 %
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	6. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	7. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	8. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	9. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	10. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348		702,664,160	699,495,046	99.55 %
2	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	702,664,160	699,495,046	99.55 %
	2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	4. Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	5. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	7. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	8. Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	9. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	10. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	11. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	12. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024

4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2025.

Tabel 4.13
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Gol/Pendidikan	SMA/sede rajat	D I s/d D III	D IV/S1	S2	S3	Jumlah
1	PPPK	3	2	11	-	-	16
2	Gol I	-	-	-	-	-	-
3	GOL II	-	1	-	-	-	1
4	GOL III	1	4	24	2	-	31
5	GOL IV	-	-	2	3	-	5
Jumlah		4	7	37	5	-	53

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat. Permasalahan utama berkaitan dengan keterbatasan kapasitas anggaran daerah dibandingkan dengan kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) yang jumlahnya masih cukup signifikan, sehingga intervensi program harus dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

ketersediaan data perumahan yang akurat dan mutakhir masih menjadi tantangan, khususnya dalam proses verifikasi dan validasi sasaran penerima manfaat. Dinamika perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat menyebabkan data calon penerima bantuan perlu diperbarui secara berkala agar tepat sasaran dan sesuai dengan indikator SPM.

keterbatasan sumber daya manusia serta kapasitas pendampingan di lapangan turut mempengaruhi percepatan realisasi kegiatan peningkatan kualitas rumah. Koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kelurahan, serta dukungan masyarakat juga masih perlu diperkuat mengingat penanganan perumahan tidak dapat dilakukan secara parsial.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Untuk Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator layanan mencapai kategori Tuntas Paripurna dan Tuntas Utama. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin rasa aman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan layanan dasar yang terencana dan terukur.

Rincian Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Rincian Capaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	8269	8269	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan (100%)					-20% 20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	unit	451	451	0	100.00 %
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	dokumen	15	15	0	100.00 %
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP**	orang	6	6	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***					
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	doku men	1	1	0	100.00 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					92.33 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	250	416	-166	100.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan (100%)				-20%	12.33 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					61.67 %
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	50.00 %
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	doku men	0	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	doku men	1	1	0	100.00 %
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	73.33 %
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana					100.00 %
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksem plar	5	5	0	100.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	3	3	0	100.00 %
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia					80.00 %
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik					40.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	3	3	0	100.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.0
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					96.75 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	360	387	-27	100.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan (100%)				-20%	16.75 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					83.75 %
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	50.00 %
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	doku men	0	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	doku men	1	1	0	100.00 %
	2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	doku men	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	doku men	2	2	0	100.00 %
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	7	7	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00 %
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	90.00 %
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					80.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	80	80	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	0	100.00 %
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %
	1) Gladi Lapang					100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	doku men	1	1	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	14	-4	100.00 %
	2) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					50.00 %
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	10	10	0	100.00 %
	5. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	75.00 %
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	70	70	0	100.00 %
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	11	11	0	100.00 %
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	18	18	0	100.00 %
	4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	475	0	475	
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Format Tahapan	Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)				100.00 %
	1.PENDATAAN					100.00 %
	Form 5.A.1 Daftar Warga Negara Yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana					100%
	Form 5.A.2 Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara					100%
	Form 5.A.3 Rekapitulasi Kelompok Warga Negara Berdasarkan Kelompok Kerawanan Desa					100%
	Form 5.A.4 Rekapitulasi Aparat Dan Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana					100%
	Form 5.A.5 Daftar Petugas Operasi Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan Lokasi Penugasan					100%
	Form 5.A.6 Rekapitulasi Warga Negara Wajib Latih					100%
	Form 5.A.7 Daftar Ketersediaan Peralatan Pendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana					100%
	Form 5.A.8 Daftar Ketersediaan Stok Logistik Pengungsian					100%
	Form 5.A.9 Daftar Warga Negara Yang Menjadi Korban Bencana (Diisi Dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%
	Form 5.A.10 Daftar Status Korban Bencana (Diisi Dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%
	Form 5.A.11 Daftar Petugas Aktif Pada Operasi Tanggap Darurat Bencana (Diisi Dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%
	Form 5.A.12 Daftar Kejadian Bencana (Diisi Dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	2.PERHITUNGAN					100.00 %
	Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					100%
	Form 5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Diisi Dan Diperbarui Untuk Setiap Bencana Yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)					100%
	3.PERENCANAAN					100.00 %
	Form 5.C.1 Rencana Pemenuhan Dan Kerangka Pendanaan Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					100%
	Form 5.C.2 Rencana Proyeksi Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana					100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.92 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	250	250	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Layanan (100%)					16.92 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					84.60 %
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	2	2	0	100.00 %
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	2	2	0	100.00 %
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	15	12	3	80.00 %
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	29	8	21	27.59 %
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	250	250	0	100.00 %
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	250	250	0	100.00 %

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Pontianak 2024

Pada indikator Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota, capaian SPM mencapai 100,00%. Seluruh 8.269 orang sasaran layanan telah terlayani secara optimal. Selain pemenuhan penerima layanan dasar, mutu layanan juga terpenuhi sepenuhnya, ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana Satpol PP, pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan Perda dan Perkada, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat, serta



pemenuhan standar pelayanan terhadap dampak penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana, capaian SPM tercatat sebesar 92,33%. Seluruh sasaran penerima layanan dasar telah terlayani, namun capaian mutu layanan masih perlu ditingkatkan. Beberapa komponen, seperti legalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), penyediaan perangkat keras pendukung sosialisasi, serta ketersediaan tenaga teknis dan surveyor pada pemasangan rambu evakuasi, belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun demikian, kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana melalui sosialisasi tatap muka maupun media sosial telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian layanan.

Selanjutnya, pada indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, capaian SPM mencapai 96,75%. Seluruh sasaran penerima layanan dasar telah terlayani, dengan dukungan capaian mutu layanan sebesar 83,75%. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, antara lain penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi, pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat, gladi kesiapsiagaan, serta penyediaan sarana prasarana komunikasi darurat dan peralatan keselamatan. Namun demikian, masih terdapat beberapa komponen mutu yang perlu ditingkatkan, seperti legalisasi dokumen perencanaan dan pemenuhan peralatan keselamatan individu.

Pada indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, capaian mutu layanan telah mencapai 100,00%, ditandai dengan terpenuhinya seluruh tahapan pendataan, perhitungan, dan perencanaan penanganan darurat bencana sesuai ketentuan. Sementara itu, pada indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR), capaian SPM tercatat sebesar 96,92%. Seluruh sasaran penerima layanan telah terlayani, dengan capaian sangat baik pada aspek waktu tanggap, SOP penanganan kebakaran, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban. Namun, capaian mutu layanan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada pemenuhan

sarana prasarana pemadam kebakaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya pemadam kebakaran.

4.5.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi.

Adapun anggaran dan realisasi Tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
KOTA PONTIANAK			4,443,876,010	3,966,264,784	89.25 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANSTIBUM)		2,211,810,600	2,172,339,850	98.22 %
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444		1,370,220,400	1,349,316,450	98.47 %
	1. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	197,045,400	193,947,450	98.43 %
	3. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	122,000,000	121,996,000	100.00 %
	4. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	370,960,000	369,810,000	99.69 %
	5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan	Unit	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	prasarana ketentraman dan ketertiban umum				
6.	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
7.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
8.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
9.	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
10.	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
11.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
12.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
13.	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
14.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	425,240,000	424,470,000	99.82 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	15. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	254,975,000	239,093,000	93.77 %
	16. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
	17. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
	18. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455		841,590,200	823,023,400	97.79 %
	1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	137,090,200	136,537,400	99.60 %
	2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	236,180,000	233,699,000	98.95 %
	3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	468,320,000	452,787,000	96.68 %
	4. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	5. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
	7. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	8. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	9. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	10. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	11. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	0	0	0%
	12. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457		0	0	0.00 %
	1. Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
	2. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	3. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	4. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
	5. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		1,415,257,640	1,042,222,738	73.64 %
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456		34,231,600	16,176,200	47.26 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	1. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	34,231,600	16,176,200	47.26 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443		873,639,540	696,920,423	79.77 %
	1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	57,722,000	53,740,760	93.10 %
	3. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	8,604,000	0	0%
	4. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	174,689,970	151,578,431	86.77 %
	5. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	6. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	50,394,000	40,147,997	79.67 %
	7. Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	8. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	140,742,400	56,577,474	40.20 %
	9. Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	129,445,600	119,800,000	92.55 %
	10. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	71,025,600	69,756,570	98.21 %
	11. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	12. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
	13. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	14. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	15. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	174,689,970	151,578,431	86.77 %
	16. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	57,722,000	53,740,760	93.10 %
	17. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	8,604,000	0	0%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445		507,386,500	329,126,115	64.87 %
	1. Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
	2. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	161,563,000	132,887,000	82.25 %
	3. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	220,772,500	104,929,000	47.53 %
	4. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	6. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	115,801,000	91,310,115	78.85 %
	7. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	8. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	9,250,000	0	0%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446		0	0	0.00 %
	1. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	4. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
	5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	6. Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	7. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	8. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	9. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	10. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	11. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	12. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
	13. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		816,807,770	751,702,196	92.03 %
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449		458,368,770	404,191,283	88.18 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	1. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	173,900,000	154,548,000	88.87 %
	4. Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	5. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	39,680,000	37,180,000	93.70 %
	6. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	7. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	8. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	9. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
	10. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	11. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	12. Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	13. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	14. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	244,788,770	212,463,283	86.79 %
	15. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	16. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450		0	0	0.00 %
	1. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	2. Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
3	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451		0	0	0.00 %
	1. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459		358,439,000	347,510,913	96.95 %
	1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	120,939,000	118,073,913	97.63 %
	2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
	3. Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	237,500,000	229,437,000	96.61 %
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458		0	0	0.00 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	2. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	3. Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	4. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kota Pontianak 2025

4.5.4 Dukungan Personil

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2025.

Tabel 4.16
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Gol/Pendidikan	SMP/sede rajat	SMA/seedera jat	D I s/d D III	D IV/S1	S2	Jumlah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
1	PPPK	-	21	-	-	-	21
2	Gol I	-	-	-	-	-	-
3	GOL II	1	2	2	-	-	5



No	Gol/Pendidikan	SMP/sede raja	SMA/seder aja	D I s/d D III	D IV/S1	S2	Jumlah
4	GOL III	-	4	2	12	1	19
5	GOL IV	-	-	-	1	2	3
Jumlah		1	27	4	13	3	48
Satuan polisi Pamong Praja							
1	PPPK	-	-	-	-	-	-
2	Gol I	1	-	-	-	-	1
3	GOL II	2	84	4	-	-	90
4	GOL III	-	21	-	31	2	54
5	GOL IV	-	-	-	3	4	7
Jumlah		3	105	4	34	6	152

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

- 1) Untuk Form 5.A.1 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara yang berada dalam Radius 0-50 Meter dilokasi Penegakan Perda dan Perkada mengalami kendala untuk mendapatkan data NIK dan No KK;
- 2) Untuk penyusunan dokumen RENKON baru akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan gladi kesiapsiagaan bencana pada triwulan 3 dan 4 serta pelatihan mitigasi bencana direncanakan triwulan 4 untuk tabel A.5.1 dan A.5.2 mengalami kendala untuk mendapatkan data NIK dan KK masyarakat se Kota Pontianak yang tinggal di daerah rawan bencana (data privacy);
- 3) Bahwa bidang damkar secara aturan sesuai dengan PERDA dan SOTK baru telah bergabung kembali dengan BPBD namun untuk personil masih di Pol PP, sementara mulai bulan april 2025 personil damkar diperbantukan ke BPBD sembari menunggu perpindahan / pelantikan secara resmi.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis



Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Pelayanan SPM Sosial terhadap sasaran pemenuhan layanan dasar meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Layanan kedaruratan yang diselenggarakan di Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial dalam situasi kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan bagi pengemis dan gelandangan yang berada di luar panti. Aktivitas yang selama ini telah dilakukan yaitu pendampingan kepada penerima layanan berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi dan rujukan.

Untuk anak terlantar yang ada diluar panti, layanan dasar yang sudah diberikan hingga tahun 2025 ini sudah terpenuhi. Layanan yang sudah diberikan kepada anak terlantar di luar panti yang ada di Kota Pontianak antara lain penyediaan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak. Beberapa juga sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Masih ada jenis layanan yang belum terpenuhi pada anak telantar yang ada di luar panti menyebabkan cakupan pemenuhan layanannya pun masih rendah. Anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2024 sudah mencapai 100%.

Layanan dasar pada lansia terlantar sampai saat ini diberikan dalam

bentuk penyediaan permakanan dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pemberian layanan terhadap lansia terlantar di luar panti lingkungnya masih sedikit. Beberapa layanan belum dapat diberikan semua oleh pemerintah daerah terhadap lansia terlantar, antara lain Penyediaan sandang dan penyediaan perbekalan kesehatan.

Untuk pelayanan pada gelandangan dan pengemis dalam rangka memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti untuk sampai saat ini masih pada layanan kedaruratan dan pengaduan. Layanan lain yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar belum banyak dilakukan karena prediksi terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ini menjadi kendala sendiri. Dengan data penjangkauan saat ini, cakupan layanan rehabilitasi sosial dasar terhadap gelandangan dan pengemis mampu tercapai 100% karena semua dapat terlayani.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan dasar sosial telah dilaksanakan dengan kinerja sangat baik, dengan capaian pada masing-masing indikator berada pada rentang 98,33% hingga 100,00%. Seluruh sasaran penerima layanan dasar pada kelompok rentan pada prinsipnya telah terlayani, sementara variasi capaian terjadi pada komponen mutu layanan yang dipengaruhi oleh karakteristik kebutuhan masing-masing kelompok sasaran.

Capaian SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.17
Rincian Capaian SPM Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					98.46 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani	Orang	132	132	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					18.46 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					92.31 %
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	130	310	180.00	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0.00	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	3. Penyediaan permakanan	Orang	75	76	-1.00	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	Orang	30	93	-63.00	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	30	30	0.00	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	60	66	-6.00	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	60	67	-7.00	100.00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	18	-8.00	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	35	46	-11.00	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	15	15	0.00	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20	23	-3.00	100.00 %
	13. Layanan rujukan	Orang	40	77	-37.00	100.00 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani	Orang	81	81	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan	orang	15	18	-3.00	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan	Orang	27	27	0.00	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	Orang	60	69	-9.00	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	10	11	-1.00	100.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	16	-6.00	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10	11	-1.00	100.00 %
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	7	-5.00	100.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	16	-6.00	100.00 %
	12. Layanan rujukan	Orang	9	9	0.00	100.00 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					98.46 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani	Orang	100	106	-6	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					18.46 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					92.31 %
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	60	63	-3.00	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	8	8	0.00	100.00 %
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	15	19	-4.00	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	Orang	75	150	-75.00	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	10	23	-13.00	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	8	-3.00	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	20	52	-32.00	100.00 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	15	17	-2.00	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	10	-5.00	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	7	-2.00	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	13. Layanan rujukan	Orang	5	13	-8.00	100.00 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					98.33 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %
	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani	Orang	79	79	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					18.33 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					91.67 %
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	40	100	-60.00	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	4	4	0.00	100.00 %
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	75	91	-16.00	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	Orang	75	75	0.00	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	95	95	0.00	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	34	34	0.00	100.00 %
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	17	17	0.00	100.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	30	-20.00	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25	41	-16.00	100.00 %
	12. Layanan rujukan	Orang	25	63	-38.00	100.00 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					80.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	A. Jumlah Penerima Yang Harus Dilayani (Tidak Terjadi Bencana (100% Dengan Catatan Melakukan 3 Tahapan)) :	Orang	600	667	-67	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100.00 %
	1. Penyediaan permakanan	Orang	400	412	-12.00	100.00 %
	2. Penyediaan sandang	Orang	200	228	-28.00	100.00 %
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	80	81	-1.00	100.00 %
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	40	55	-15.00	100.00 %
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	50	52	-2.00	100.00 %

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak 2025

Pada indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, capaian SPM tercatat sebesar 98,46%. Seluruh 132 orang sasaran penerima layanan dasar telah terlayani, dengan dukungan capaian mutu layanan sebesar 92,31%. Layanan yang diberikan meliputi pendataan dan pengaduan, layanan kedaruratan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan fisik dan sosial, fasilitasi dokumen kependudukan, akses pendidikan dan kesehatan, hingga reunifikasi keluarga dan layanan rujukan. Masih terdapat beberapa jenis layanan yang belum dilaksanakan, seperti penyediaan perbekalan kesehatan, yang mempengaruhi capaian mutu secara keseluruhan.

Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti menunjukkan capaian 100,00%, baik dari sisi penerima layanan maupun mutu layanan. Seluruh 81 anak sasaran telah mendapatkan layanan secara lengkap, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kedaruratan, bimbingan sosial, fasilitasi dokumen kependudukan, akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya penelusuran dan reunifikasi keluarga. Capaian ini mencerminkan optimalnya perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pada indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, capaian SPM sebesar 98,46%, dengan seluruh sasaran penerima layanan dasar telah terlayani. Capaian mutu layanan sebesar 92,31% didukung oleh

pemenuhan berbagai layanan sosial, antara lain permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, fasilitasi dokumen kependudukan, akses layanan kesehatan, serta layanan rujukan. Namun demikian, masih terdapat beberapa komponen layanan yang belum terpenuhi, seperti penyediaan perbekalan kesehatan, yang menjadi faktor pembatas capaian mutu.

Sementara itu, indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, mencapai 98,33%. Seluruh 79 orang sasaran penerima layanan telah terlayani, dengan capaian mutu layanan sebesar 91,67%. Layanan yang diberikan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan sosial, fasilitasi dokumen kependudukan, akses layanan dasar, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan. Capaian ini menunjukkan bahwa penanganan tuna sosial telah berjalan efektif, meskipun masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek layanan penunjang.

Pada indikator Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pascabencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, capaian SPM mencapai 100,00%. Meskipun pada periode pelaporan tidak terjadi bencana besar, seluruh tahapan layanan telah dipenuhi, termasuk penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan kelompok rentan, serta layanan dukungan psikososial. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat pada kondisi darurat.

4.6.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Realisasi Adapun program kegiatan dan anggaran Tahun 2025 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM pada Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Urusan Sosial
Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	KOTA PONTIANAK		1.435.809.440	1.327.171.031	92,43%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.435.809.440	1.327.171.031	92,43%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152		1.131.274.440	1.064.116.040	94,06%
	1. Penyediaan permakanan	Orang	579.980.000	573.760.000	98,93%
	2. Penyediaan sandang	Orang	41.860.000	39.063.950	93,32%
	3. Penyediaan alat bantu	Orang	260.560.000	225.760.730	86,64%
	4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3.952.000	2.820.000	71,36%
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	9.968.480	9.799.200	98,30%
	6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	34.634.560	33.154.560	95,73%
	7. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	3.952.000	2.088.000	52,83%
	8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	31.191.400	29.369.600	94,16%
	9. Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	98.296.000	96.200.000	97,87%
	10. Pemberian layanan kedaruratan	Orang	57.220.000	43.700.000	76,37%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3.952.000	2.920.000	73,89%
	12. Pemberian layanan rujukan	Dokumen	5.708.000	5.480.000	96,01%
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153		304.535.000	263.054.991	86,38%
	1. Penyediaan makanan	Orang	145.632.000	141.957.000	97,48%
	2. Penyediaan sandang	Orang	73.838.000	62.090.500	84,09%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	21.341.000	19.840.991	92,97%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	32.389.000	23.292.500	71,91%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	31.335.000	15.874.000	50,66%

Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak 2025

4.6.4 Dukungan Personil

Pada Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Pontianak didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025.

Tabel 4.19
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial

No	Gol/Pendidikan	SMP/sederajat	SMA/sederajat	D I s/d D III	D IV/S1	S2	Jumlah
1	PPPK	1	-	3	-	-	4
2	Gol I	-	-	-	-	-	-
3	GOL II	1	1	-	-	-	2
4	GOL III	4	2	14	3	-	23
5	GOL IV	-	-	1	5	-	6
Jumlah		6	3	18	8		35

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Secara Adapun permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Sosial antara lain :

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar untuk SPM penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis pada dokumen perencanaan pagu anggarannya mencakup 4 SPM tersebut diatas dan tidak terpisah, sehingga tidak dapat membagi pagu anggaran per SPM, sehingga realisasi anggaran dicatat secara keseluruhan dan tidak terbagi per SPM.
- Faktor penyebab sulitnya menentukan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar :
 - Adanya transmigran dari luar daerah yang datang untuk mencari pekerjaan namun berakhir tidak mendapatkan pekerjaan dan terlantar;
 - Warga terlantar yang dipulangkan ke daerah asal kembali lagi;
 - Kurangnya pendidikan dan lapangan pekerjaan;
 - Masih kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas;
 - Masih kurangnya pengetahuan tentang pola pengasuhan anak.



- c. Permasalahan SPM Sosial tidak dapat diprediksi, sehingga perhitungan target kinerja pada perencanaan anggaran berdasarkan evaluasi realisasi tahun sebelumnya. Untuk pelayanan SPM Bencana Alam, realisasi pelaksanaan berdasarkan kejadian bencana alam yang dilaporkan.



BAB V PENUTUP

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun LPPD Tahun Anggaran 2025 untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Penyusunan dan Penyampaian LPPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode tahun 2020 sampai dengan 2025, yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk periode tahunan, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari masing-masing Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk penyusunan RKA yang pada akhirnya akan menghasilkan RAPBD. Proses perencanaan di Kota Pontianak telah berjalan sesuai dengan alur yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga penetapan APBD tahun 2025 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

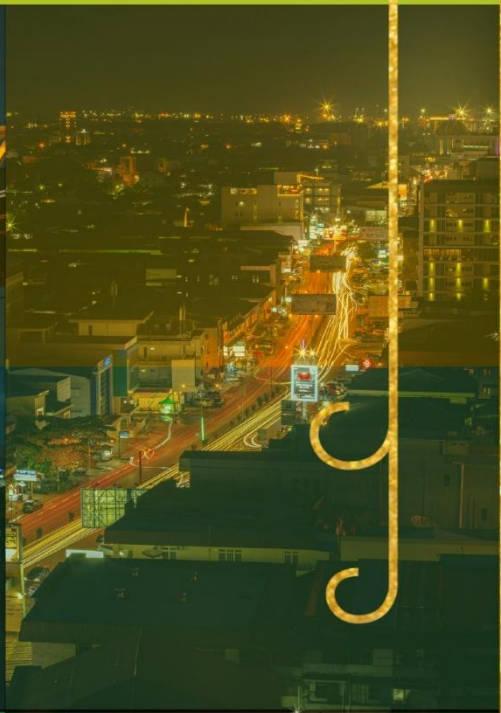
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 mencakup capaian kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja



pelaksanaan tugas pembantuan.

Secara umum, pada Tahun 2025 urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan dari 8 (delapan) urusan pilihan. Sebanyak 3 (tiga) urusan pilihan yaitu urusan Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan serta urusan Transmigrasi bukan merupakan urusan pilihan Pemerintah Kota Pontianak. Urusan wajib dan urusan pilihan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Demikian penyajian LPPD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025, secara umum Pemerintah Kota Pontianak telah melaksanakan dengan baik 43 (empat puluh tiga) aspek pada tataran pengambil kebijakan dan 21 (dua puluh satu) aspek pada tataran pelaksana kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Pemerintah Kota Pontianak
Sekretariat Daerah
Jl. Rahadi Oesman No. 3 Pontianak
www.setda.pontianak.go.id